

**ANALISA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU**

(Studi Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



OLEH :

BAKHTIAR SYAH

NIM : 10675005060

MILIK
PERPUSTAKAAN UIN AL - JAMIAH SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NO. <u>2011001001</u>
TGL. <u>25 MEI 2011</u>
PARAF. <u>[Signature]</u>

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan serta limpahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **ANALISA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU (Studi Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai)** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Terutama kepada :

1. Kepada kedua Orang Tua tersayang, Abang, serta Adikku tercinta yang menjadi semangat terbesar penulis dalam proses pembuatan skripsi ini dan atas kasih sayang, perhatian serta dukungannya yang diberikan yang tidak terhingga.
2. Drs. Azwar Harahap, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. Almasri, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Mustiqowati U.F, S.pd, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.
7. Bapak Kepala Kelurahan Wonorejo beserta pegawai yang telah memperkenalkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan.
8. Ibu Deswanti Ermi S2, S.Sos, selaku Sekretaris pada Kantor Kelurahan Wonorejo serta pegawai yang selalu memberikan bantuan dalam memperoleh data-data yang diperlukan.
9. Untuk My Friends Hasbi, Abdul Rhafik, Rustam, Dani Yudistira, Serta yang terspesial buat adinda tersayang Nurlaili Fitri, yang tiada hentinya memberikan dorongan serta motivasi sehingga penulis tetap semangat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga pengorbanan dan bimbingan terhadap penulis selama ini mendapat balasan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alaminin. Akhir kata dari penulis mengharapkan saran-saran dan masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Maret 2011

BAKHTIAR SYAH
Nim: 10675005060

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	15
1.5. Sistematika Penulisan	16
 BAB II : TELAAH PUSTAKA	
2.1. Pengertian Otonomi.....	18
2.2. Partisipasi	22
2.3. Pajak Daerah	28
2.4. Retribusi Daerah	33
2.5. Kerangka Pikiran.....	45

2.6 Definisi Konsep.....	46
2.7 Hipotesis.....	47
2.8 Variabel Penelitian.....	47
2.9 Teknik Pengukuran	49

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	51
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.3 Populasi dan Sampel	52
3.4 Teknik Pengumpulan Data	54
3.5 Teknik Analisa Data.....	55

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah singkat Kelurahan Wonorejo	56
4.2 Keadaan Geografis	57
4.3 Keadaan Penduduk.....	59
4.4 Keadaan Pegawai Kantor Lurah Wonorejo	62
4.5 Uraian Tugas Aparat Pemerintah Kelurahan Wonorejo	64

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden.....	68
5.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru	71

5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru.....	92
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	94
6.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**ANALISA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
(Studi Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai)**

ABSTRAK

Lingkungan rumah tinggal merupakan salah satu objek retribusi kebersihan yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, hasil retribusi sampah pada saat ini belum dapat diundulkan sebagai sumber keuangan daerah. Rendahnya penerimaan pemerintah dari retribusi sampah terlihat dari tidak tercapainya target penerimaan retribusi yang berasal dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan.

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka populasi penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Wonorejo berjumlah 2.742 KK. Mengingat luasnya populasi dan mengingat waktu serta biaya maka ditetapkan jumlah sampel sebanyak 93 KK dari masyarakat dan 1 orang dari Kelurahan Wonorejo dan 2 orang dari petugas kebersihan.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode interview dan kuisioner. Analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan kemudian ditabulasi dalam bentuk tabel dengan angka dan persentase dan diuraikan berdasarkan teori-teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan Pertama, bahwa Pelaksanaan Program Kebersihan Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik, dimana Kota Pekanbaru mampu meraih penghargaan di bidang kebersihan berupa Piala Adipura lima kali berturut-turut dan juga pelaksanaan kebersihan oleh petugas kebersihan Kota Pekanbaru telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan masih sangat rendah, hal ini dibuktikan 25,0 responden atau sebesar 25,0%, indikasinya yaitu pembayaran retribusi bukan atas kesadaran sendiri, pembayaran menunggu jika diminta, masih banyak yang menolak jika dilakukan pemungutan retribusi kebersihan, dan masih banyak masyarakat yang membayar retribusi tidak tepat pada waktunya. Ketiga, yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru adalah karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar Retribusi Kebersihan, kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi Perda No.4 tahun 2000 tentang retribusi kebersihan dan juga kurang proaktifnya upaya pemungutan retribusi kebersihan oleh petugas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari UUD 1945 tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara *pemerintah dan masyarakat* dalam menjalankan hukum dan pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual.

Rasyid mencatat (dalam Labolo, 2007: 1) bahwa pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari kekacauan wilayah yang dihuni manusia, dimana hal ini menimbulkan terbentuknya kelompok demi melindungi diri dari kelompok lain, yang selanjutnya sekelompok ini memiliki otoritas khusus, sehingga lambat laun terbentuk sistem kemasyarakatan yang akhirnya terbentuk sebuah Negara dan Pemerintahan. Dalam perjalanan selanjutnya dirumuskan pula secara lebih spesifik fungsi pemerintahan melalui aspek manajemen, dimana pemerintahan dikaitkan dengan fungsi-fungsi kepemimpinan, memberi petunjuk, memerintah,

menggerakkan, koordinasi, pengawasan, dan motivasi dalam hubungan pemerintah.

Dalam sejarah perjalanan Indonesia selaku Bangsa dan Negara, telah banyak perubahan sistem pemerintahan dalam rangka memenuhi fungsi pemerintahan yang sesungguhnya, namun dengan berbagai perkembangan yang ada dan tidak berjalannya fungsi pemerintahan tersebut secara maksimal menyebabkan masyarakat selaku warga negara yang memiliki hak terhadap negara menuntut berbagai perubahan. Perubahan yang sangat mendasar pada beberapa tahun belakangan ini dengan pemberian kekuasaan yang lebih luas kepada daerah atau yang disebut dengan otonomi daerah. Hal ini merupakan wujud dari kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang sentralistik pemerintah pusat selama ini yang dalam berbagai hal kebijakan tidak melibatkan (memberdayakan) masyarakat daerah.

Dari tuntutan ini maka lahirlah undang-undang otonomi daerah, yang saat sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang melengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada kepala daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dengan adanya semangat otonomi daerah, pemerintah daerah pun menjadi semakin terbuka dan leluasa dalam mengembangkan dan memajukan wilayahnya masing-masing sesuai semangat dan kultur daerah yang ada tanpa harus menunggu kebijakan pusat lagi melalui peraturan daerah sesuai kebutuhan masyarakat daerah tersebut, namun dalam pembuatan kebijakan tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi.

Provinsi Riau merupakan salah satu penyumbang Devisa terbesar di negara ini melalui hasil alam minyak dan gas, cukup merasakan berkah dari otonomi daerah ini. Hal ini juga dirasakan oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.

Pekanbaru sebagai kota dari Provinsi Riau merupakan salah satu Kota yang paling merasakan dampak positif dari otonomi daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan semakin maju dan berkembangnya Kota Pekanbaru diberbagai bidang kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun pelayanan pemerintahannya. Pada pidato sambutan Wali Kota Pekanbaru Bapak Herman Abdullah, dalam rangka HUT Kota Pekanbaru ke 223 tanggal 23 Juni 2007, beliau menyatakan bahwa Pekanbaru yang dulunya sebuah dusun kecil, namun berkat perkembangan dan kemajuan pembangunan daerah, kota ini telah terbentuk dan menjelma menjadi Kota besar, luas daerah lebih kurang 632,26 Km² untuk jumlah penduduk mencapai 754.467 jiwa.

Disisi lain, dengan kepadatan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 1.139 jiwa perkilometer persegi, menimbulkan permasalahan baru terutama dalam pelayanan, pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Perkembangan lain dirasakan dalam pengaturan administrasi pemerintahan, dimana berdasarkan peraturan daerah Pekanbaru nomor 03 tahun 2003 dilakukan pemekaran dari 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan dan 50 kelurahan menjadi 58 Kelurahan. Kemajuan-kemajuan yang dialami oleh Kota Pekanbaru, tentunya tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah Kota yang diwujudkan dalam program-program pembangunan Kota Pekanbaru. Salah satu program Kota Pekanbaru yang sangat didengung-dengungkan oleh Wali Kota Pekanbaru sejak terpilihnya beliau menjadi Wali Kota tahun 2002 adalah program K3 (Kebersihan, Keindahan dan ketertiban). Program kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru boleh dikatakan saat ini cukup berhasil, hal ini dibuktikan dengan penerimaan penghargaan adipura kebersihan dan penghargaan sebagai Kota Metropolitan (kategori keindahan dan perkembangan Kota) dalam lima tahun berturut-turut sampai saat sekarang ini, yaitu Piala Adipura dari tahun 2005 sampai sekarang.

Namun untuk mencapai keberhasilan tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan biaya yang cukup besar minimal Rp.720.000.000 dalam setiap tahunnya melalui APBD Kota Pekanbaru. Hal inilah yang menjadi fenomena tersendiri dimana masih tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru setiap tahunnya, sementara beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah belum tergarap dengan optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Bab IV pasal 5, menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ;dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Undang-undang tersebut, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Pada pasal 5 undang-undang nomor 33 tahun 2004 diatas, menyebutkan bahwa retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu di optimalkan pelaksanaanya.

Tabel 1.1 : Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Dari Tahun 2007 Sampai 2010 (Dalam Miliaran Rupiah)

No	Jenis PAD Kota Pekanbaru	Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Hasil Pajak Daerah	69,026	56,281	64,216	60,622	80,776	69,865	84,874	70,658
2	Hasil Retribusi Daerah	54,911	36,394	46,014	43,512	59,691	43,701	69,793	47,562
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,903	3,625	2,408	1,915	2,626	2,766	2,836	2,638
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	25,207	12,737	44,905	12,694	33,778	13,526	35,786	32,645

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru 2011

Berdasarkan pada Tabel 1.2 di atas tergambar secara jelas bahwa pada tahun 2010 target yang ditetapkan dari hasil pajak daerah sebesar Rp.84.874 miliar sedangkan yang terealisasi Rp 70,658 miliar ini berarti penerimaan pajak daerah tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan atau kurang Rp. 14,216 miliar, tahun 2010 target dari penerimaan dari hasil retribusi daerah yang telah ditetapkan Rp. 69,793 miliar sedangkan yang terealisasi Rp 47,562 miliar ini berarti target penerimaan hasil retribusi daerah tidak tercapai atau kurang Rp.22,231 miliar, tahun 2010 target penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2,836 miliar sedangkan yang terealisasi Rp 2.638 miliar ini berarti penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kurang dari target RP 0,198 miliar , tahun 2010 target penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 35,786 miliar sedangkan yang terealisasi Rp 32,645 miliar ini berarti penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kurang dari target atau kurang Rp. 3,141 miliar.

Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah dari tahun ketahun, dan salah satu penerimaan retribusi daerah yang belum tergarap dengan optimal adalah retribusi kebersihan. Tingkat kontribusi retribusi kebersihan dalam peningkatan PAD Kota Pekanbaru masih sangat rendah.

Dalam upaya mengoptimalkan pembayaran retribusi kebersihan inilah, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DPRD Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Undang-Undang No. 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan. Untuk menjalankan undang-undang ini tentunya diperlukan keterlibatan pemerintahan dibawahnya yaitu Dinas Kebersihan dan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Pengolaan kebersihan ini merupakan tanggung jawab Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru, namun penanggung jawab penagihan dan pemungutan retribusi kebersihan diberikan wewenang kepada pihak kecamatan dan pihak kelurahan.

Dalam Keputusan Wali Kota Pekanbaru No. 139 tahun 2001 bab IV pasal 90 dinyatakan bahwa kepala kelurahan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan. Uraian tugas adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan secara umum, pembinaan pemerintah, ketentraman dan ketertiban, pembinaan pembangunan fisik dan non fisik kemasyarakatan serta pembinaan kesejahteraan masyarakat
2. Melaksanakan tugas pemerintahan atasannya

3. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatan
4. Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban

Dari hal ini menunjukkan mesti adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu penguatan pemberdayaan masyarakat di daerah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, karena masyarakat telah menunjukkan diri bahwa mereka memiliki kehendak untuk memperbaiki segi-segi kehidupan ekonomi, sosial dan aspek-aspek lainnya.

Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri ataupun partisipasi dalam mensukseskan program-program pemerintahan demi kemajuan bersama.

Demi mensukseskan Program Kebersihan Pemerintah Kota Pekanbaru, partisipasi aktif masyarakat Pekanbaru terutama dalam membayar retribusi Kebersihan tentunya sangat di butuhkan. Sedangkan untuk menumbuhkan dan memberdayakan partisipasi masyarakat ini perlu fasilitator berupa pemerintahan itu sendiri, dan tidak bisa dipungkiri bahwa struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan kelurahan. Berdasarkan PERDA No. 03 tahun 2003 Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan.

Dalam hal ini, dapat dilihat dari tingkat pendapatan retribusi kebersihan yang diperoleh oleh Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) yakni salah

satunya adalah SKPD Kecamatan Marpoyan Damai, seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel I.2: Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kecamatan Marpoyan Damai 2007 sampai 2010 (Dalam Puluhan Jutaan Rupiah)

No	Jenis Retribusi Daerah	Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Retribusi Kebersihan	150,086	120,372	180,310	160,212	250,010	145,710	250,030	140,620
2	Retribusi Leges	90,521	60,924	95,516	73,902	125,500	80,152	125,700	89,253

Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai, 2011

Dari Tabel I.3 di atas tergambar dengan jelas bahwa target pendapatan retribusi kebersihan dan retribusi leges yang ditetapkan oleh Camat Marpoyan Damai mengalami peningkatan dari tahun ketahun namun realisasi penerimaan dari pajak retribusi kebersihan dan retribusi leges tidak pernah tercapai pada target yang telah ditetapkan.

Tabel I.3: Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kelurahan Wonorejo 2007 sampai 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Jenis Retribusi Daerah	Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Retribusi Kebersihan	13,076	11,472	15,310	12,912	17,210	13,581	17,318	13,715
2	Retribusi Leges	2,321	9,20	3,218	1,321	4,020	2,153	4,040	2,161
Total		15,397	12,392	18,526	14,233	21,230	15,734	21,358	15,876

Sumber : Kantor Kelurahan Wonorejo, 2011

Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat Pendapatan Kelurahan Wonorejo khususnya dari retribusi kebersihan adalah sebesar Rp. 21,358 atau hanya terealisasi sebesar Rp. 15,876 dari target yang telah ditetapkan oleh pihak Kelurahan Wonorejo.

Tabel 1.4: Target Penerimaan Pajak Retribusi Kebersihan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2011

No	Uraian	Unit/Volume	Tarif (Rp)	Penerimaan Dalam Rupiah
1	Rumah Hunian			
	- Kelas a	410	5000	2.050.000
	- Kelas b	1097	3000	3.291.000
	- Kelas c	1092	1000	1.092.000
2	Kantor	23	40.000	920.000
3	Wisma			
	- Kelas a	4	100.000	400.000
	- Kelas b	8	50.000	400.000
	- Kelas c	6	25.000	150.000
4	Perbengkelan	15	100.000	1.500.000
5	Pengerajian Kayu	7	30.000	210.000
6	Usaha Perabot	13	30.000	390.000
7	Rumah Makan			
	- Kelas 1	9	150.000	1.350.000
	- Kelas 2	3	100.000	300.000
	- Kelas 3	8	50.000	400.000
8	Apotik	5	50.000	250.000
9	Dealer			
	- Kelas 1	2	200.000	400.000
	- Kelas 2	6	100.000	600.000
10	Rumah Sakit			
	- Sedang	3	300.000	900.000
	- kecil	6	200.000	1.200.000
11	Wartel			
	- Besar	7	25.000	175.000
	- Kecil	6	15.000	90.000
12	Bongkar Barang	5	50.000	250.000
13	Mini Market	6	75.000	525.000
14	Hotel	3	200.000	600.000
Total		2.742		17.318

Sumber : Kantor Kelurahan Wonorejo, 2011

Dari keterangan tabel di atas tergambar dengan jelas bahwa target retribusi kebersihan Kelurahan Wonorejo tahun 2011 sebesar Rp.17,318. target selalu naik tiap tahunnya. Kelurahan Wonorejo merupakan salah satu Kelurahan yang berada di tengah-tengah Kota Pekanbaru dan memiliki kepadatan penduduk yang cukup besar. Berdasarkan data yang diterima di sebutkan Kelurahan Wonorejo tahun

2008 memiliki jumlah penduduk Kelurahan Wonorejo sebanyak 15.850 jiwa yang terdiri dari 2.742 KK. Cakupan kewilayahaan Kelurahan Wonorejo pada tahun 2006 terdiri dari 5 RW dengan jumlah RT sebanyak 27 RT, namun dengan dimekarkannya salah satu RW pada akhir tahun 2008 maka jumlah RW di kelurahan Wonorejo saat ini sebanyak 7 RW dengan jumlah RT sebanyak 30 RT.

Tabel 1.5 : Jumlah Tunggakan Membayar Retribusi Kebersihan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai

No	Uraian	Tahun		Persentase (%)	
		2008	2009	2008	2009
1.	Rumah Hunian	363	490	88,53	94,23
2.	Wisma	9	5	2,19	0,96
3.	Dealer	6	4	1,46	0,76
4.	Kantor	13	6	3,17	1,15
5.	Perbengkelan	11	8	2,68	1,53
6.	Wartel	8	7	1,95	1,34
Total		410	520	100%	100%

Sumber : kantor Kelurahan Wonorejo, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat ada beberapa masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam membayar retribusi kebersihan yang menunggak dalam membayar retribusi kebersihan tahun 2008 sebanyak 410 KK, sedangkan tahun 2009 yang menunggak membayar retribusi kebersihan sebanyak 520 KK.

Tabel 1.6 : Jumlah Menghindar Membayar Retribusi Kebersihan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai

No	Uraian	Tahun		Persentase (%)	
		2008	2009	2008	2009
1.	Rumah Hunian	137	174	93,5	96,66
2.	Bongkar Barang	3	2	1,5	1,11
3.	Pengerajian Kayu	9	4	4,5	2,22
Total		200	180	100%	100%

Sumber : kantor Kelurahan Wonorejo, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat ada beberapa masyarakat yang tidak mau ikut dalam membayar retribusi kebersihan yang menghindar dalam membayar retribusi

kebersihan pada tahun 2008 sebanyak 200 KK, sedangkan tahun 2009 yang menghindar dalam membayar retribusi kebersihan sebanyak 180 KK.

Tabel 1.7 : Jumlah Tidak Membayar Retribusi Kebersihan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai

No	Uraian	Tahun		Persentase (%)	
		2008	2009	2008	2009
1.	Rumah Hunian	249	121	97,26	96,8
2.	Rumah Makan	7	4	2,73	3,2
Total		256	125	100%	100%

Sumber : kantor Kelurahan Wonorejo, 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat ada beberapa masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam membayar retribusi kebersihan yang tidak membayar retribusi kebersihan pada tahun 2008 sebanyak 256 KK, sedangkan pada tahun 2009 yang tidak mau membayar retribusi kebersihan sebanyak 125 KK.

Dengan luasnya cakupan kewilayahan dan kepadatan penduduk Kelurahan Wonorejo, tentunya akan membawa permasalahan tersendiri bagi pihak pemerintahan Kelurahan dalam menjalankan program kebersihan pemerintah kota pekanbaru. Salah satu permasalahan utama pengaruh kepadatan penduduk ini adalah masalah penumpukan sampah, penyumbatan Drainase, semerawutnya tata letak perumahan penduduk, dan semakin rawannya tingkat keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Dalam hal ini tentunya partisipasi masyarakat Kelurahan Wonorejo sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini yaitu salah satunya dengan ikut berpartisipasi dalam menjalankan Program Kebersihan Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun partisipasi masyarakat saja belumlah cukup tanpa keterlibatan pemerintah setempat terutama pihak pemerintahan kelurahan sebagai fasilitator terlaksananya program pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam wilayah perkotaan, biasanya mempunyai masyarakat yang lebih kompleks atau heterogen (beraneka ragam), biasanya sulit untuk menggerakkan partisipasi masyarakat sekaligus pada level kota. Oleh karena itu, penumbuhan partisipasi masyarakat harus dimulai dari suatu unit tertentu atau dimulai dari komunitas terbawah dari masyarakat yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat setingkat RT dan RW yang nantinya dapat dikontrol atau dibimbing oleh pemerintah kelurahan setempat. .

Sampah merupakan isu penting di lingkungan perkotaan yang terus-menerus dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktifitas pembangunan. Lingkungan rumah tinggal merupakan salah satu objek retribusi sampah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, hasil retribusi sampah pada saat ini belum dapat diandalkan sebagai sumber keuangan daerah. Rendahnya penerimaan pemerintah dari retribusi sampah terlihat dari tidak tercapainya target penerimaan retribusi yang berasal dari masyarakat.

Sebagai salah satu kelurahan yang berada di tengah-tengah Kota Pekanbaru, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup padat, pemerintah Kelurahan Wonorejo seharusnya lebih mampu memaksimalkan PAD Kota Pekanbaru dari retribusi yaitu dengan cara menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi kebersihan yang sangat rendah. Untuk itu perlu diteliti mengapa hal ini bisa terjadi, dan sejauh mana peran pemerintah Kelurahan Wonorejo berkenaan pelaksanaan retribusi kebersihan ini.

Setelah peneliti melakukan peninjauan lapangan dengan melalui wawancara berberapa masyarakat di lingkungan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai. Banyak masyarakat yang tidak membayar retribusi kebersihan, mereka beralasan karena sampah mereka jarang dipungut oleh petugas kebersihan, dan ada juga mereka yang menolak membayar uang kebersihan jika dipungut oleh petugas, mereka menjawab karena tidak terjadwalnya masa pemungutan retribusi, sehingga ketika dipungut lagi tidak ada uang, ada juga yang memberi alasan karena sudah dipungut oleh kebersihan lingkungan mereka, yang secara swadaya sendiri melakukan pengumpulan sampah masyarakat dan ada juga yang beralasan karena mereka takut uang yang mereka bayar tidak sampai ke kas daerah.

Dalam pengamatan penulis beberapa alasan masyarakat ini, bisa dapat diterima, namun hal ini terjadi sebenarnya karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi retribusi kebersihan kota pekanbaru secara umum dan masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang isi Perda No.4 Tahun 2000 itu. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan itu sendiri kepada masyarakat, masih rendah aktivitas pemungutan retribusi oleh petugas yang di sebabkan karena terbatasnya personil yang ada dilingkungan kelurahan tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan di kota pekanbaru khususnya di Kelurahan Wonorejo. Maka penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam bentuk penelitian Skripsi dengan judul:

“ANALISA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU”

(Studi Kasus : Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai)

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan agar pembahasan tidak terlalu melebar, maka penulis memfokuskan penelitian dengan perumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Kelurahan Wonorejo dalam membayar Retribusi Kebersihan tersebut?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- 1) Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak terkait terutama bagi pihak pemerintahan kelurahan wonorejo dan pemerintahan kota pekanbaru

tentang tingkat partisipasi masyarakat kota pekanbaru dalam membayar retribusi kebersihan.

- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi serta saran bagi pihak-pihak terkait tentang pentingnya partisipasi masyarakat kota pekanbaru dalam membayar retribusi kebersihan.
- 3) Bagi pihak-pihak lain, dapat bermanfaat sebagai bahan petunjuk atau bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
- 4) Menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal ini maka peneliti membagi bagian sistematika penulisan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi Lokasi dan Waktu Penelitian, jenis dan sumber data, Populasi dan Sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi sejarah kelurahan wonorejo, keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pegawai Kantor kelurahan Wonorejo, uraian tugas aparat Pemerintah Kelurahan Wonorejo.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil pengolahan data lapangan, identitas responden, analisa data tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan , faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan

BAB VI : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Otonomi

Secara teoritis, pengertian otonomi menurut Ndraha (2003:176) bahwa otonomi adalah hak bawaan suatu masyarakat, bukan berian pemerintah. Hak adalah bagian integral suatu kedaulatan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuannya dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti pelayanan masyarakat, melaksanakan pembangunan dan perlindungan masyarakat.

Menurut Brasz dalam Kencana (2002:35) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap masyarakat.

Ilmu pemerintahan tidak bisa lepas dari kata birokrasi, dengan demikian birokrasi dalam ilmu pemerintahan berarti organisasi atau kantor pemerintahan yang mempunyai kekuasaan. Administrasi pemerintahan, kadang-kadang dipakai

pula istilah administrasi publik, dan kadang-kadang juga diterjemahkan dengan birokrasi pemerintahan.

Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan birokrasi pemerintahan adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi pemerintahan dibawah departemen dan lembaga-lembaga non departemen, baik dipusat maupun di daerah, seperti ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa ataupun kelurahan (Santoso, 2001:21)

Peran aparatur birokrasi pemerintahan yang kita kenal dengan nama pegawai negeri sipil semestinya lebih condrung sebagai agen pembaharuan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparatur birokrasi pemerintahan adalah berupa perumusan dan melaksanakan kebijakan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dan pelayanan guna tercapainya pembangunan yang adil dan merata disegala bidang.

Rasyid (dalam Labolo, 2001:1) menyatakan bahwa pemerintah pada awalnya dibentuk adalah untuk menghindari kekacauan wilayah yang dihuni manusia, dimana hal ini menimbulkan terbentuknya kelompok demi melindungi diri dari kelompok lain, yang selanjutnya kelompok ini memiliki otoritas khusus, sehingga lambat laun terbentuk sistem kemasyarakatan yang akhirnya terbentuklah sebuah Negara atau pemerintah.

Dalam perjalanan selanjutnya dirumuskan pula secara lebih spesifik fungsi pemerintahan melalui aspek manajemen, dimana pemerintah dikaitkan dengan fungsi-fungsi kepemimpinan, memberi petunjuk, memerintah, mengerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan.

Dalam pendekatan sosiologis, dapat pula kita ketahui satu-satunya alasan utama terbentuknya institusi pemerintahan adalah adanya motivasi alamiah dari setiap individu untuk hidup secara berkelompok.

Rasyid dalam Labolo, (2007:22) membagi fungsi pemerintahan dalam empat bagian yaitu pelayanan masyarakat (pelayanan umum) (public service), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Dimana pun dan dengan alasan apapun suatu pemerintahan dilahirkan, ia merupakan suatu organisasi yang yaris sempurna (Labolo, 2007:87). Pemerintah sesungguhnya berkeinginan untuk memenuhi segala bentuk tuntutan dan kebutuhan kelompok yang menyandarkan harapannya kepada consensus formal, yang dimulai dengan memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat bahkan sampai memasuki wilayah privasi. Alasannya adalah ketika individu dianggap belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara wajar, maka diperlukan dikemudian hari (Labolo, 2007:88).

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan berbicara mengenai otonomi daerah, maka tidak akan lepas dari adanya konsep dasar bahwa otonomi merupakan bentuk kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Nugroho, 2000:35)

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada kepala daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dengan adanya semangat otonomi daerah, pemerintah daerah pun menjadi semakin terbuka dan leluasa dalam mengembangkan dan memajukan wilayahnya masing-masing sesuai dengan semangat dan kultur daerah yang ada tanpa harus menunggu kebijakan pusat lagi melalui peraturan-peraturan daeran sesuai kebutuhan masyarakat daerah tersebut, namun dalam pembuatan kebijakan tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi.

Dalam mencapai tujuan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun dalam skala kedaerahan menunjukan mesti adanya hubungan yang harmonis antara pemerintahan dengan masyarakat. Paradigma penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada zaman reformasi ini lebih kepada pemberdayaan daerah dan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Untuk itu penguatan pemberdayaan masyarakat di daerah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, karena masyarakat telah menunjukkan diri bahwa mereka

memiliki kehendak untuk memperbaiki segi-segi kehidupan ekonomi, sosial dan aspek-aspek lain sebagainya. Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri maupun dalam mensukseskan program-program pemerintahan demi kemajuan bersama.

2.2. Partisipasi

Ditinjau dari etimologis, bahwa kata partisipasi adalah merupakan paduan dari kata *participate* (Bahasa Belanda), atau *participation* (Bahasa Inggris) yang berarti bagian atau ikut serta. Selamat (2002: 26). Mengemukakan bahwa partisipasi, ialah peran serta dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam menyusun program pembangunan ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut sertanya memanfaatkan hasil pembangunan yang nyata.

Sedangkan menurut Seligman dan Amin, dalam Zarman (2010: 14), menyatakan pengertian partisipasi ialah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh sasaran kesatuan yang lebih besar” dari rumusan diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi itu selalu dominant bahkan tidak dapat di pisahkan dalam segala kehidupan masyarakat ataupun kelompok masyarakat.

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Adapun beberapa faktor-faktor lain yang sangat eratnya kaitannya

dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak hal ini. (Pangabean, 2000 : 34), menyatakan :

1. Tingkat pendidikan
2. Tingkat pendapatan
3. Jarak tempat tinggal
4. Sikap
5. Penyuluhan

Dalam hal ini penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan membuat wajib pajak mengerti akan fungsi dan arti pajak. Itu seharusnya agar pendapatan dari sektor pajak menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajak atau dari pemerintah itu sendiri.

Menurut Kumorotomo (2005: 135-138), mengatakan partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam memilih
2. Partisipasi kelompok
3. Kontrak antara warga negara dengan pemerintah
4. Partisipasi warga negara secara langsung dilingkungan pemerintah.

Disamping itu adanya partisipasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk masa berikutnya Budiarmo dalam Kaho, (2002:112)

Soetrisno (2002:206-207), definisi partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan program dan hasil pembangunan. Selain itu partisipasi juga diartikan sebagai yang memiliki aspirasi yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan

Bahwa nampaknya pemerintah Indonesia telah menyakini bahwa partisipasi rakyat dalam setiap gerak pembangunan nasional merupakan salah satu prasyarat utama keberhasilan setiap proses pembangunan di Indonesia. Namun kenyataan dilapangan, pemahaman tentang partisipasi masyarakat ini sering disalah artikan, dimana pemerintah sering memahami partisipasi masyarakat sebagai kemauan rakyat atau masyarakat secara penuh mendukung mutlak setiap program-program pemerintah yang telah rancang oleh pemerintah, tanpa terlebih dahulu mengkomunikasikannya dengan masyarakat.

Dalam kamus bahasa Indonesia (Normies, 2001: 116-151), partisipasi diartikan sebagai hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Masyarakat diartikan sejumlah atau sekelompok manusia dalam arti yang lebih luas dan terikat oleh suatu kebudayaan atau kebiasaan yang mereka anggap sama. Sehingga partisipasi masyarakat (*social participation*) diartikan sebagai suatu bentuk interaksi sosial sekelompok orang (masyarakat) terhadap suatu kegiatan.

IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) (2000:94), mengemukakan beberapa pandangan tentang partisipasi ditinjau dari segi kualitas yaitu antara lain:

1. Partisipasi sebagai masukan kebijaksanaan
2. Partisipasi sebagai strategi

3. Partisipasi sebagai komunikasi
4. Partisipasi sebagai media pemecahan publik dan
5. Partisipasi sebagai kegiatan atau terapi sosial

Partisipasi jenis yang terakhir dipandang sebagai kurang memenuhi kualitas dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, namun partisipasi inilah yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (dalam IKAPI, 2000:99), dengan jelas memberikan tempat bagi publik untuk berpartisipasi. Pasal 6 ayat 1 dari UU itu menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya

Undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai revisi dari UU. No. 4 Tahun 1982 (Sughandhy Aca, 2007:113), menyebutkan bahwa

1. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menaggulangi kerusakan dan pencemaran;
3. Mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam UU. No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (Sughandhy Aca, 2007:113), juga disebutkan bahwa masyarakat mempunyai

kewajiban dalam memelihara kualitas ruang, termasuk memelihara ruang yang direncanakan dan dilakukan sesuai kemampuan tiap orang.

Meskipun demikian, perundang-undangan tersebut masih belum optimal dilaksanakan karena kurang berfungsinya lembaga pengontrol pelaksanaan (pemerintah), kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hukum, dan kurang diberlakukannya sistem sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia atau gabungan dari beberapa individu-individu. Hal ini menunjukkan bukti manusia selaku individu merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk dalam kehidupannya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain, baik didalam keluarga atau dirumah, disekolah dan dilingkungan pada tingkatan RT dan RW maupun yang lebih luas seperti tingkat kelurahan bahkan Negara sekalipun. (Elly, 2006:63).

Dalam wilayah perkotaan, biasanya mempunyai masyarakat yang lebih kompleks atau heterogen (beraneka ragam), biasanya sulit untuk menggerakkan partisipasi masyarakat harus dimulai dari suatu unit tertentu atau dimulai dari komunitas terbawah dari masyarakat yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat setingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang nantinya dapat dikontrol atau dibimbing oleh pemerintah kelurahan setempat.

Menurut Sugandhy Aca, (2007:108-109), masyarakat perkotaan yang kompleks biasanya terdapat 3 jenis komunitas didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. **Komunitas Primordial**, suatu ikatan sosial atas dasar persamaan ciri-ciri sosial mendasar dan sulit untuk diubah, seperti kesamaan agama, ras, kesukuan (daerah asal) dan sebagainya. contoh majelis ta'lim, wirid ibu-ibu, perkumpulan masyarakat minang, perkumpulan masyarakat melayu, dan lain-lain.

2. **Komunitas Professional** (Okupasional), suatu ikatan atas dasar persamaan profesi atau kerjaan, contoh Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Akutansi Indonesia, Serikat Seluruh Indonesia, dan lain-lain.
3. **Komunitas Spatial**, suatu ikatan yang berdasarkan pada kesamaan tempat tinggal. Untuk daerah perkotaan maupun pedesaan komunitas ini kita kenal melalui wadah organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Melalui komunitas spatial, khususnya pada skala Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diharapkan dapat membentuk masyarakat yang dinamis tanpa memandang suku, agama, dan ras untuk bersama-sama berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan.

Partisipasi aktif masyarakat ini dapat berupa inisiatif anggota masyarakat itu sendiri ataupun partisipasi aktif dalam mensukseskan program-program pemerintah demi kemajuan bersama, seperti program kebersihan pemerintah kota pekanbaru.

Demi mensukseskan program kebersihan pemerintah kota pekanbaru, partisipasi aktif masyarakat pekanbaru tentunya sangat dibutuhkan. Untuk menumbuhkan dan memberdayakan partisipasi masyarakat ini perlu fasilitator berupa pemerintah itu sendiri. Struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah kelurahan.

Menurut Sughandhy Aca, (2007:114), bahwa konsep partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup, ada dua faktor yang sangat diperlukan yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif. Kesadaran ini dapat ditimbulkan melalui peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan, baik dari

sekolah, buku, media massa maupun dari sesama anggota komunitas atau pemimpin komunitas/penggerak masyarakat. Partisipasi disini dapat berupa keikutsertaan secara langsung dalam kegiatan ataupun berupa dukungan financial untuk pembiayaan kegiatan.

2. Penggerak masyarakat serta dukungan pemerintah. Penggerak masyarakat dalam skala komunitas permukiman dapat diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Kelurahan, maupun tokoh masyarakat.

Tampaklah disini peran atau partisipasi masyarakat Kelurahan Wonorejo sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungannya yaitu salah satunya dengan ikut berpartisipasi dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru.

2.3. Pajak Daerah

Ditinjau dari lembaga pemungutan, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Secara garis besar, hieraki pemerintah di Indonesia di bagi mejadi dua macam, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangan dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2008 : 9).

Tetapi jenis Pendapatan Asli Daerah tidak terbatas pada pajak dan retribusi daerah saja. Berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pada Bab 1V pasal 5, menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ;dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2. Dana Perimbangan

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pajak daerah merupakan sumber penghasilan yang universal yang dapat ditemui disemua Negara yang menerapkan kebijakan desentralisasi. Pengertian

pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo, (2003 : 1), adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Ada sebagian masyarakat berpandangan bahwa dirinya membayar pajak khususnya Pajak retribusi kebersihan, karena takut adanya sanksi hukuman. Menurut Yozar Anwar (2001: 111), orang membayar pajak karena dia takut dihukum bila dia menyembunyikan pajak / tidak membayar pajak. Pendapat lain dikemukakan oleh Nick Devas (2000: 138-139), yang mengatakan bahwa penerimaan pajak rendah karena sanksi yang cukup berat terhadap Wajib Pajak bila ia terlambat membayar pajak belum pernah ada sehingga, tidak ada dorongan untuk membayar pajak pada waktunya.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor sanksi juga ikut mempengaruhi terhadap meningkatnya maupun menurunnya penerimaan pajak sebab dengan sanksi yang diterapkan dapat membuat masyarakat menjadi patuh untuk membayar pajak, tetapi disisi lain sanksi yang diterapkan apabila kurang tegas dapat menimbulkan masyarakat menjadi seenaknya untuk membayar pajak karena tidak adanya sanksi yang tegas untuk menindak terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor sanksi mempengaruhi pula terhadap tinggi rendahnya masyarakat dalam membayar pajak sebab dengan sanksi yang diberikan akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh untuk membayar pajak disebabkan takut adanya sanksi, sebaliknya sebagian

Wajib pajak tetap tidak membayar pajak meskipun sudah diterapkan sanksi sebab sanksi tersebut tidak berat. Dengan demikian kurang tegasnya sanksi yang diterapkan pada Wajib Pajak akan menghambat penerimaan pajak.

Nick Devas (2000:101), menyatakan bahwa pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut :

- a. Hasil (yield), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasilnya itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi pertumbuhan penduduk dan sebagainya juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungutan.
- b. Keadilan (equity), yaitu dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal artinya adalah orang atau obyek pajak yang mempunyai kedudukan ekonomi sama maka dikenakan beban pajak yang sama. Secara vertikal adalah bagi mereka yang mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat atau memiliki sumber daya ekonomi lebih besar hendaknya memberikan sumbangan yang lebih besar. Dan pajak tersebut haruslah adil dari tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

- c. Daya guna ekonomi (Economic efficiency), artinya pajak hendaknya mendorong atau tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
- d. Kemampuan melaksanakan (ability to implement), suatu pajak harus dapat dilaksanakan sudut kemauan politik dan tata usaha.
- e. Kecocokan dengan sumber penerimaan daerah (suitability as a local revenue), artinya haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain, pajak daerah juga hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2003 : 51), pajak daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Menurut (Siahaan, 2008:9), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, yang wewenang pemungutnya dilaksanakan

oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

2.4. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah dikemukakan oleh Mardiasmo, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan” (Mardiasmo, 2002:100).

Berdasarkan ketentuan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 dan direvisi menjadi undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pungutan daerah tersebut perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah. Kota Pekanbaru saat ini masih mengambil rujukan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam undang-undang ini, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan jenis pendapatan daerah yang cukup populer. Retribusi daerah adalah jenis pungutan yang dikenakan kepada masyarakat berkenaan dengan pemberian suatu jenis jasa tertentu. Retribusi daerah ditetapkan dengan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Didalam undang-undang No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, (Ismail, 2007:74).

Berdasarkan pasal 5 undang-undang Nomor 33 tahun 2004 diatas, bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, sehingga perlu di optimalkan pelaksanaannya. Untuk itulah maka pemerintah kota pekanbaru melalui DPRD kota pekanbaru telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan

Sumber dana bagi daerah terdiri dari, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah, retribusi daerah, hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain PAD yang sah adalah merupakan komponen dari PAD (Sidik, 2002).

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Thee Kian Wic, 2001:190).

Menurut Suparmoko (2002:85), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Sutrisno, (: 202), Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat karena seseorang atau badan hukum menggunakan jasa dan barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk

2.4.1. Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksud guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 2. Walaupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah belum berlaku bagi Kota Pekanbaru, namun jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, sebagaimana disebut dibawah ini.

1. ***Retribusi Jasa Umum*** adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dan retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan manfaat umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraanya.
- f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan;
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang baik.

A. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum Adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan kakus
- k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan Dan;
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. *Retribusi Jasa Usaha* adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dan retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu dan;
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyoganya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

B. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha Adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- j) Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. ***Retribusi Perizinan Tertentu*** adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan;
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

C. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu Adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.4.2. Fungsi Retribusi Daerah

Sebagaimana diuraikan diatas, retribusi merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersama-sama dengan pajak daerah dan PAD lainnya. Perbedaan pokok antara retribusi dengan pajak daerah adalah bahwa retribusi berkaitan langsung dengan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada wajib retribusi, sedangkan dalam pajak daerah tidak terkait langsung dengan jasa yang diterima oleh wajib pajak atas pembayaran pajak yang mereka lakukan kepada Pemerintah Daerah. Namun ada juga kesamaan diantara keduanya yaitu kedua-duanya berfungsi sebagai *regulatory* atau pengaturan. Salah satu retribusi yang bersifat pengaturan adalah retribusi perizinan tertentu

2.4.3. Tata Cara Pemungutan dan Sanksi Retribusi Daerah

Pasal 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 berbunyi “Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan”. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak diserahkan pada pihak ke tiga. Namun bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat

selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan. Diatur dalam Pasal 27 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah menurut Bratakusumah, (2009 :26), peraturan daerah tentang retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya didalamnya mengatur ketentuan mengenai :

- a. Nama, objek dan subjek retribusi
- b. Golongan retribusi
- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- e. Struktur dan tarif retribusi
- f. Tata cara pemungutan, termasuk mengatur ketentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran
- g. Tata cara penagihan
- h. Tanggal mulai berlakunya.

Untuk menjalankan undang-undang ini tentunya diperlukan keterlibatan pemerintah dibawahnya yaitu Dinas Kebersihan dan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan yang ada di Pekanbaru. Pengelolaan kebersihan ini menjadi

tanggung jawab Dinas Kebersihan kota pekanbaru, namun penanggung jawab penagihan dan pemungutan retribusi kebersihan diberikan wewenang kepada pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 pada Bab VII pasal 9 menyatakan bahwa : (1) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan dan atau tanah/lapangan atau yang merupakan sumber sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 dan 3 peraturan daerah ini, atas imbalan jasa penyelenggaraan, pelayanan, pengangkutan ,pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah dari TPS ke/di TPA sebagaimana yang dimaksud pasa 6 dan 7 dikenakan retribusi kebersihan. (2) Retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan untuk selama 1 (satu) bulan.

Adapun ketetapan besaran retribusi sampah untuk Komplek/ Bangunan Rumah Hunian dan usaha dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Rumah Tangga setiap rumah atau sepetak rumah hunian :
 - a. Kelas A Rp. 5.000,-
 - b. Kelas B Rp. 3.000,-
 - c. Kelas C Rp. 1.000,-
2. Pimpinan Kantor/Direksi Perusahaan Komplek Bangunan Kantor, Gedung dan sejenisnya baik milik pemerintah maupun milik swasta :
Rp.40.000,-
3. Pimpinan Taman Hiburan Komplek Taman Hiburan atau sejenisnya :
Rp.75.000,-
4. Pimpinan Bioskop Komplek Bioskop atau sejenisnya : Rp.100.000,-

5. Pimpinan Hotel Komplek atau Bangunan perhotelan :

- Bintang Empat Keatas Rp. 300.000,-
- Bintang Tiga Rp. 250.000,-
- Bintang Dua Rp. 200.000,-
- Bintang Satu Rp. 150.000,-
- Melati Tiga Rp. 100.000,-
- Melati Dua Rp. 75.000,-
- Melati Satu Rp. 50.000,-

6. Pimpinan, Penghinaan, Wisma Komplek Atau Bangunan Penginapan,
Wisma atau Sejenisnya:

- Kelas A Rp. 100.000,-
- Kelas B Rp. 50.000,-
- Kelas C Rp. 25.000,-

7. Pimpinan Usaha Perbengkelan Komplek/Bangunan Perbengkelan atau
Sejenisnya : Rp. 100.000,-

8. Pimpinan Usaha Pengelolahan Tepung Gandum Dan Kacang Kedelai
Komplek/ Bangunan Perusahaan roti, mie, tahu dan tempe atau
Sejenisnya : Rp. 50.000,-

9. Pimpinan Usaha Pengergajian Kayu Komplek/Bangunan Pengergajian
Kayu atau Sejenisnya : Rp. 30.000,-

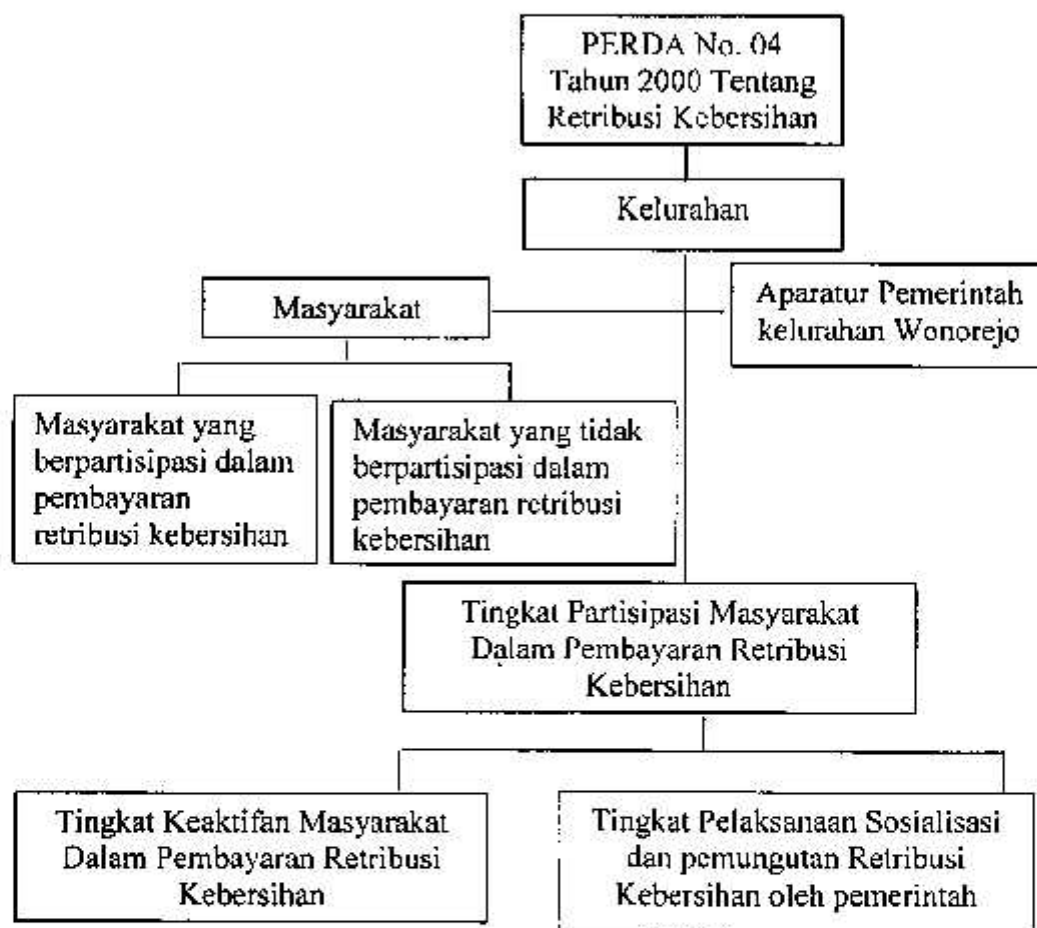
10. Pimpinan Usaha Perabot Komplek/ Pembangunan Usaha Perabot atau
sejenisnya Rp. 30.000,-

11. Pedagang Kayu Komplek/ Pembangunan Penjualan Kayu atau sejenisnya : Rp. 30.000,-
12. Pimpinan Usaha Rumah Makan Komplek/Bangunan Rumah Makan, Restoran, Café atau Sejenisnya :
 - Kelas 1 Rp. 150.000,-
 - Kelas 2 Rp. 100.000,-
 - Kelas 3 Rp. 50.000,-
13. Pimpinan Usaha Apotik Komplek/Bangunan Rumah Obat Apotik sejenisnya : Rp. 50.000,-
14. Pedagang kendaraan bermotor Komplek dealer, showroom, servis ranmor atau Sejenisnya :
 - Kelas 1 Rp. 200.000,-
 - Kelas 2 Rp. 100.000,-
15. Pimpinan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Klinik, Praktek Dokter Komplek/Bangunan Rumah Sakit atau sejenisnya :
 - Besar Rp. 500.000,-
 - Sedang Rp. 300.000,-
 - Kecil Rp. 200.000,-
16. Pimpinan Wartel, Kiosphone Bangunan Wartel atau sejenisnya :
 - Besar Rp. 25.000,-
 - Kecil Rp. 15.000,-
17. Pompa Bensin (SPBU) Pembangunan Pompa Bensin atau sejenisnya : Rp. 100.000,-

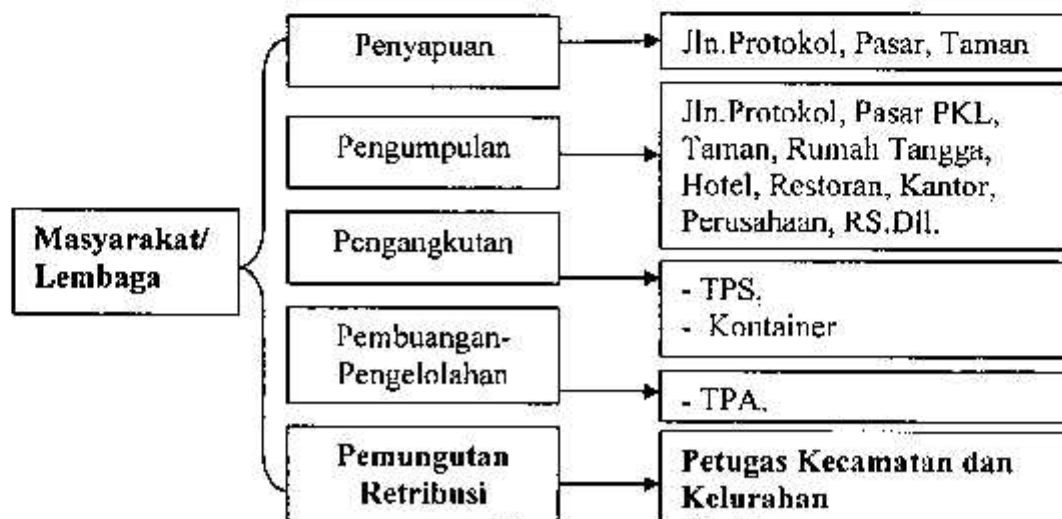
18. Pangkalan Bongkar Muat Barang Komplek Bongkar Muat Barang atau sejenisnya : Rp. 50.000,-
19. Toserba atau Mini Market Komplek/Bangunan Market atau sejenisnya :
Rp. 75.000

2.5. Kerangka Pikiran

Gambar I.2: Kerangka Pikiran



Gambar I.I: ALUR KEBERSIHAN LINGKUNGAN



2.6. Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam penulis penelitian ini maka penulis membuat sebuah konsep operasional sebagai berikut :

Sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Pekanbaru nomor 139 tahun 2001 tentang uraian tugas Pemerintah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

1. Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu pemerintah setingkat kota/ kabupaten di Provinsi Riau selaku yang mengeluarkan kebijakan program kebersihan
2. Pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai yaitu pemerintah selaku pelaksana kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang diberi kewenangan dan tugas dalam proses sosialisasi dan penungutan retribusi kebersihan
3. Kelurahan Wonorejo yaitu salah satu kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Marpoyan Damai sebagai daerah objek penelitian
4. Masyarakat Wonorejo yaitu penduduk yang bermukim di wilayah pemerintah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai.
5. Partisipasi adalah keikutsertaan atau turut berperan serta dalam membayar retribusi kebersihan

2.7. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : **“Diduga rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Wonorejo dalam membayar retribusi sampah disebabkan oleh kurang maksimalnya peran pemerintah Kelurahan dalam memberi sosialisasi Perda No. 04 Tahun 2000 tentang retribusi kebersihan dan Rendahnya upaya pemungutan retribusi kebersihan Kota Pekanbaru”**

2.8. Variabel Penelitian

Adapun operasional Variabel serta indikator-indikator penelitian ini adalah sebagai berikut : (Sumber Perda Kota Pekanbaru No. 04 Tahun 2000).

1. Keaktifan masyarakat dalam pembayaran retribusi kebersihan dengan indikator-indikator penelitian :
 1. Membayar atas kesadaran sendiri
 2. Datang sendiri ke loket pembayaran
 3. Tidak pernah menolak petugas pemungut retribusi kebersihan
 4. Tidak pernah terlambat dalam pembayaran
2. Pelaksanaan sosialisasi dan pemungutan retribusi kebersihan oleh pemerintah dengan indikator-indikator penelitian : (Sumber : Uchana, Efendy, 2002 : 26).
 - a. Adanya Dengan sosialisasi yang optimal berupa :
 1. Himbauan Melalui Media Massa

2. Himbauan Melalui Spanduk, Baliho, Selebaran, Dan Lain-Lain
 - b. Adanya tempat pembayaran retribusi (loket)
 - c. Adanya petugas pemungut retribusi disetia RT atau RW
 - d. Adanya sangsi (hukuman)

Tabel 2.1. Operasional Variabel

Konsep	Variabel/ Dimensi	Indikator	Item yang dinilai	Data (ordinal, Nominal, Interval, dan Rasio)
1	2	3	4	5
Menurut Soetrisno (1995:207) definisi partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan program dan hasil pembangunan	Partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan kota pekanbaru berdasarkan perda No.4 tahun 2000 tentang retribusi kebersihan	1.Keaktifan masyarakat dalam pembayaran retribusi kebersihan	1. Membayar atas Kesadaran sendiri 2. Datang sendiri Ketempat pembayaran 3. Tidak pernah menolak petugas pemungut retribusi kebersihan 4 Tidak pernah terlambat dalam pembayaran	1. Tinggi 2. Sedang 3.Rendah
		2.Pelaksanaan sosialisasi dan pemungutan retribusi kebersihan oleh pemerintah	1.Adanya sosialisasi yang optimal berupa : - Himbauan Melalui Media Massa - Himbauan Melalui Spanduk, Baliho, Selebaran, Dan Lain-Lain 2.Adanya tempat pembayaran retribusi (loket) 3.Adanya petugas pemungut 4. Adanya sangsi (hukum)	1. Tinggi 2. Sedang 3.Rendah

Sumber : Data olehan penelitian, tahun 2011

2.9. Teknik Pengukuran

Untuk menilai secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Wonorejo dalam membayar retribusi kebersihan dan tingkat pelaksanaan sosialisasi dan pemungutan retribusi kebersihan oleh pemerintah Kelurahan Wonorejo, maka digunakan interval pengukuran sebagai berikut :

- a. Apabila tingkat pelaksanaan sub indikator (item penilaian) dari indikator variabel terlaksana antara 67 % -100 %, maka kategorinya **Tinggi**
- b. Apabila tingkat pelaksanaan sub indikator (item penilaian) dari indikator variabel terlaksana antara 34 % - 66 %, maka kategorinya **Sedang**
- c. Apabila tingkat pelaksanaan sub indikator (item penilaian) dari indikator variabel terlaksana antara 0 % - 33 %, maka kategorinya **Rendah** (Fitriana, 2010 : 26-27)

Adapun indikator variabel dan sub indikator variabel dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Tingkatan keaktifan masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan kota pekanbaru, dengan kesadaran sendiri.
 1. Membayar atas kesadaran sendiri
 2. Datang sendiri ke tempat (loket) pembayaran.
 3. Tidak pernah menolak petugas pemungut retribusi kebersihan
 4. Tidak pernah terlambat dalam pembayaran retribusi kebersihan

2. Tingkat pelaksanaan sosialisasi perda no 4 tahun 2000 tentang retribusi kebersihan oleh pemerintah Kelurahan Wonorejo, dengan sub indikator penilaian berupa :
 - a. Tingkat pelaksanaan pertemuan (musyawarah) dengan masyarakat.
 - b. Tingkat pelaksanaan himbauan melalui media massa (cetak dan elektronik)
 - c. Tingkat pelaksanaan himbauan melalui spanduk, baliho, selebaran, dan lain-lain
3. Tingkat pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan oleh pemerintah Kelurahan Wonorejo, dengan sub indikator penilaian berupa :
 - a. Tingkat Ketersediaan tempat pembayaran (loket pembayaran)
 - b. Tingkat Ketersediaan petugas pemungut retribusi kebersihan di setiap RW atau RT se Kelurahan Wonorejo
 - c. Tingkat penerapan sanksi (hukuman) warga yang tidak membayar retribusi kebersihan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Wonorejo dan Pemerintahan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai.

3.2.1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli hingga bulan November 2010.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.2.1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa tanggapan atau jawaban atas pokok permasalahan dari penelitian.

3.2.2. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenaan penelitian berupa penjelasan umum, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi unit kerja, di kelurahan dan fasilitas-fasilitas yang tersedia di masyarakat dalam menjalankan program pemerintahan.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiyono, 2005 : 90)

Populasi dalam penelitian ini adalah berupa seluruh masyarakat kelurahan wonorejo yang terdiri dari 7 RW dan 30 RT dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.742 KK. Sampel diambil berdasarkan teknik *Accidental Sampling* dimana untuk pemerintahan kelurahan sampel yang diambil adalah aparatur yang berhubungan dengan kebijakan pelaksanaan Retribusi Kebersihan yaitu Kepala Kelurahan dan petugas pemungut retribusi kebersihan, sedangkan masyarakat yang dijadikan sampel diambil dari warga 3 RW dan 10 RT, yaitu yang terdiri dari beberapa orang kepala keluarga yang diambil termasuk ketua RT (Rukun Tetangga) dan ketua RW (Rukun Warga)

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2005: 91).

Teknik pengambilan sampel, dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling* (kebetulan), siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti

dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2004: 96).

Sedangkan untuk ukuran sampel dari populasi menggunakan rumus *slovin*, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas kesalahan ketelitian sebesar 10%. Berdasarkan rumus *Slovin* (Umar, 2005:146), tersebut, jumlah sampel yang diambil dari populasi dari 2.742 menjadi sebanyak 96 dapat dilihat dari tabel dibawah :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n= Ukuran sampel

N= Ukuran populasi

e = Taraf kesalahan dalam penentuan sampel.

$$n = \frac{2.742}{1 + 2.742(10)^2}$$

$$n = \frac{2.742}{1 + 2.742(0.01)}$$

$$n = \frac{2.742}{28,42}$$

$$n = 96,48$$

$$n = 96$$

Pada penelitian ini yang dijadikan sampel berjumlah 96 dari 2.742 populasi, sampel dari Lurah Wonorejo berjumlah 1 orang, dan dari petugas kebersihan berjumlah 2 sampel dari 2 populasi. Untuk penarikan sampel ini menggunakan

metode sensus, dan sampel untuk warga Warga Wonorejo berjumlah 93 dari 2.742 populasi.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel III.I dibawah ini:

Tabel : III.I: Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase (%)
		Populasi	Sampel	
1	Lurah Wonorejo	1	1	100
2	Petugas Retribusi Kebersihan	2	2	100
3	Kepala Keluarga (Warga, RT, RW)	2.742	93	3,4
Jumlah		2.742	96	100

Sumber : Data Olahan, 2011

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdiri dari metode sebagai berikut :

3.4.1. Observasi,

yaitu dengan pengamatan langsung tentang kegiatan-kegiatan masyarakat dan pemerintah kelurahan yang berhubungan dengan kegiatan pembayaran retribusi kebersihan

3.4.2. Wawancara,

yaitu melalui tatap muka dan wawancara langsung kepada responden untuk dapat data yang dibutuhkan.

3.4.3. Kuisioner,

yaitu dengan mengajukan lembaran pertanyaan kuisioner yang diberikan langsung kepada responden agar dijawab berdasarkan instruksi yang terdapat pada lembaran tersebut.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis penerimaan pajak retribusi kebersihan pada kota pekanbaru ini melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Setelah data penelitian yang dibutuhkan terkumpulan dan terklasifikasi menurut jenisnya maka selanjutnya dianalisa dengan mengaitkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk kemudian dihasilkan terhadap hasil yang akurat dan relevan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Kelurahan Wonorejo

Kelurahan Wornorejo yang sekarang pada mulanya merupakan suatu wilayah RW saja yakni RW II dan termasuk dalam Kelurahan Wilayah Wonorejo Kecamatan Sukajadi dengan pemerintahan sekitar Kantor Walikota sakarang. Namun melihat perkembangan Kota dan kepadatan penduduk yang semakin meningkat sesuai dengan arus urbanisasi pada tahun 1978/1979 oleh pemerintah Kota Pekanbaru diadakan pemekaran wilayah dan salah satunya dibentuk Kelurahan Wonorejo dan menetapkan wilayah antara jalan Sudirman sampai ke jalan Duyung dan jalan Nangka sampai dengan anak sungai Sail I batasan nya. Adapun Kelurahan Wonorejo yang pertama kali ditunjuk adalah Bapak Kamidi.

Menurut informasi dari para sesepuh dan orang tua di Kelurahan Wonorejo bahwa nama Wonorejo diberikan pertama kali oleh almarhum Sastor Prawiro dan lebih dikenal dengan Pak Nyamuk. Nama Wonorejo mempunyai makna, yaitu Wono yang berarti Hutan dan Rejo berarti makmur atau damai.

Jadi pada saat itu diharapkan bahwa pada suatu saat nanti hutan ini dapat berubah menjadi perkampungan yang makmur dan damai oleh lalu-lintas manusia. Nampaknya melihat kenyataan saat ini harapan telah terwujud menjadi kenyataan apalagi dilihat dari perkembangan jalan Nangka yang sekarang berganti nama menjadi jalan Tuanku Tambusai semakin hari semakin padat dan ramai.

Perkembangan selanjutnya dengan melihat kebutuhan akan pelayanan Pemerintah yang tidak seimbang lagi dengan kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran wilayah lagi yakni dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Pekanbaru No 03 Tahun 2003 tentang pemekaran Kecamatan dari 8 (Delapan) Kecamatan menjadi 12 (Duabelas) Kecamatan serta 50 Kelurahan menjadi 58 Kelurahan.

Kelurahan Wonorejo yang dulunya termasuk administratif Kecamatan Sukajadi, melalui Perda No 03 Tahun 2003 maka sekarang masuk kedalam wilayah administratif Kecamatan Marpoyan Damai. Data tahun 2008 menunjukkan bahwa wilayah Kelurahan Wonorejo terdiri dari 7 RW dan 30 RT.

4.2. Keadaan Geografis

4.2.1. Letak Dan Batas Wilayah

Kelurahan Wonorejo merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang memiliki luas lebih kurang 14.265 Km² dan Terletak di tengah-tengah Ibu Kota Pekanbaru. Pada umumnya tanah kosong sudah sulit ditemukan di Kelurahan Wonorejo karena telah dimanfaatkan untuk perumahan dan pemukiman penduduk, sehingga masalah sengketa tanah jarang terjadi di Kelurahan ini. Namun dengan kepadatan penduduk ini mengakibatkan rawan kejahatan sosial di tengah-tengah masyarakat dan salah-satunya adalah masalah produksi sampah yang di hasilkan rumah tangga yang cukup besar setiap harinya.

Adapun batas wilayah Kelurahan Wonorejo saat ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Kampung Melayu dan
Kelurahan Jadirejo
- Sebelah Selatan : Kelurahan Tangkerang Tengah
- Sebelah Barat : Kelurahan Tangkerang Barat
- Sebelah Timur : Kelurahan Cinta Raya Kecamatan Sail

4.2.2. Keadaan Alam/Topografi

Keadaan tanah di daerah Kelurahan Wonorejo adalah tanah merah kuning dan sebagian kecil adalah tanah yang terdiri tanah organosol yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan-bahan organik.

Secara umum kondisi geografis Kelurahan Wonorejo sebagai berikut:

- Tinggi tempat dari permukaan laut : 25-30 M
- Curah hujan rata-rata pertahun : 2000-3000 Mm
- Keadaan suhu rata-rata (Pada Siang Hari) : 31-33⁰ C
- Keadaan suhu rata-rata (Pada Malam Hari) : 31-33⁰ C

Dilihat dari iklim dan rata-rata hujan yang relatif banyak tanah di Kelurahan Wonorejo sangat cocok dan subur bagi tanaman nenas dan sayuran karena tanah tersebut terdiri dari endapan lumpur atau *Aluvial*. Berdasarkan RUTRK Kota Pekanbaru maka Kelurahan Wonorejo ditetapkan sebagai daerah pemukiman juga daerah perdagangan dan pertokoan serta sebagian untuk perkantoran pemerintahan dan swasta.

4.3. Keadaan Penduduk

Penduduk dalam wilayah Kelurahan Wonorejo berdasarkan data tahun 2009 sebanyak 16.969 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.758 Kepala Keluarga. Dari jumlah penduduk menurut kelompok umur maka komposisi yang paling banyak berada antara batas usia 5 tahun sampai dengan 29 tahun yakni lebih kurang sebanyak 6.273 jiwa atau mencapai 36,97% dari seluruh penduduk Kelurahan Wonorejo, atau boleh dikatakan pada usia Sekolah.

Melihat struktur penduduk di Kelurahan Wonorejo, apabila dilihat dari jenis kelamin boleh dikatakan cukup seimbang antar jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Laki-Laki	9.012	53
2	Perempuan	7.957	47
Jumlah		16.969	100%

Sumber Data : Kantor Lurah Wonorejo Tahun 2011

Pola pemukiman penduduk berpencar hampir merata pada setiap wilayah Kelurahan Wonorejo yang terdiri dari 7 RW dan 30 RT. Sebagian besar penduduk Kelurahan Wonorejo adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Swasta, Buruh dan juga pedagang yaitu hampir sekitar 48% dari keseluruhan jumlah penduduk.

Penduduk yang mata pencariannya sebagai pegawai negeri/ swasta karena tempat tinggal mereka mayoritas di daerah perkotaan dan dekat dengan perkantoran pemerintah/swasta, penduduk yang mata pecaharian sebagai pedangan adalah penduduk yang memiliki modal untuk membuka usaha dan bertempat tinggal di daerah dekat dengan pasar. Akan tetapi masih banyak juga

penduduk Kelurahan Wonorejo yang hidupnya sebagai buruh yang hidupnya masih tergantung pada PT. Bangkinang yang bergerak pada sektor pengolahan karet, terutama yang bertempat tinggal disekitar perusahaan tersebut.

4.3.1. Mata Pencarian

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase (%)
1	Pengusaha Sedang/besar	1.417	8,35
2	Pengrajin/Industri Kecil	1.332	7,84
3	Buruh Industri	1.258	7,41
4	Buruh Bangunan	3.526	20,77
5	Pedagang	2.647	15,59
6	Jasa Angkutan	1.154	6,80
7	PNS	1.425	8,39
8	TNI dan Polri	576	3,39
9	Pensiunan	1.109	6,53
10	Belum/Tidak kerja	2.525	14,88
Jumlah		16. 969	100 %

Sumber Data : Kantor Lurah Wonorejo Tahun 2011

4.3.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial ditengah masyarakat, termasuk perilaku kepedulian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan kepedulian terhadap lingkungan dan sekitarnya. Jika ditinjau dari segi pendidikan masyarakat Kelurahan Wonorejo, dapat dikatakan sudah cukup maju, karena penduduknya rata-rata sudah mengenyam pendidikan cukup baik, sehingga dengan tingkat pendidikan itu semestinya tingkat partisipasi penduduk terhadap kewajiban membayar retribusi sampah semakin baik pula.

Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Wonorejo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.3: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	1.259	7,42
2	Tidak tamat SD.	2.123	12,51
3	Tamatan SD	2.637	15,54
4	SLTP/ Sedrajat	3.016	18,30
5	SLTA Sedrajat	4.307	25,38
6	Diploma I/II	1.800	10,60
7	Akademi/Strata I	638	3,76
8	Strata II	135	0,79
9	Strata III	-	-
10	Tidak Terdata	963	5,68
Jumlah		16.969	100%

Sumber Data : Kantor Lurah Wonorejo Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Wonorejo rata-rata di atas pendidikan dasar 9 tahun atau diatas pendidikan SLTP sampai perguruan tinggi yaitu 58,85%. Namun masih terdapat 35,47% yang mengenyam pendidikan SD bahkan tidak tamat atau belum bersekolah bagi yang berusia dini.

4.3.3. Agama Dan Kepercayaan

Tabel IV.4: Jumlah Penduduk Menurut Agama Dan Kepercayaan Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai

No	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Islam	13.264	78,17
2	Khatolik	1.100	6,48
3	Protestan	1.600	9,43
4	Hindu	5	0,03
5	Budha	1.000	5,89
Jumlah		16. 969	100%

Sumber Data : Kantor Lurah Wonorejo Tahun 2011

Dari keterangan tabel di atas dapat jelaskan bahwa penduduk Kelurahan Wonorejo terdapat beberapa agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat yaitu Islam, Khatolik, Protestan, Hindu dan Budha. Mayoritas agama yang dianut masyarakat Kelurahan Wonorejo adalah agama Islam, yaitu sebanyak 13.264 Jiwa atau sama dengan 18,17% . dan yang paling sedikit penduduk di Kelurahan Wonorejo adalah penduduk yang menganut agama Hindu sebanyak 5 jiwa atau sekitar 0,03 % dari jumlah keseluruhan penduduk.

4.4. Keadaan Pegawai Kantor Lurah Wonorejo

Dalam menjalankan tugas pokok pelayanan kepada masyarakat, tentunya peran pegawai dapat mempengaruhi keberhasilan tugas tersebut. Pegawai yang berada dalam Kantor Kelurahan Wonorejo adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan tujuan organisasi kelurahan khususnya dan tujuan negara pada umumnya.

Oleh karena itu setiap pegawai perlu diperhatikan dan diberikan pengarahan serta motivasi agar mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai Kantor Kelurahan Wonorejo sebanyak 7 orang yang setiap pegawai mempunyai perbedaan satu sama lain, baik dalam hal kepangkatan, maupun pengetahuan yang dimilikinya.

Pendidikan formal yang dimiliki sangat menentukan pada kemampuan berfikir pegawai tersebut. Semakin tinggi pendidikan seorang pegawai, diharapkan semakin mampu pegawai tersebut dalam berfikir dan semakin meningkatkan pola pikirnya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat. Lebih jelas dapat dilihat jumlah pegawai Kelurahan Wonorejo berdasarkan pendidikan formal pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 5 : Jumlah Pegawai Kantor Kelurahan Wonorejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SLTP	1	12,5
2.	SMA/SMEA	2	25
3.	Perguruan Tinggi	5	62,5
Jumlah		8	100%

Sumber Data : Kantor Kelurahan Wonorejo Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan formal pegawai Kantor Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yaitu lulusan SLTP sebanyak 1 orang atau 12,5 %, sedangkan lulusan SMA/SMEA sebanyak 2 orang atau 25%, sedangkan lulusan perguruan tinggi sebanyak 5 orang atau 62,5% dengan demikian tingkat pendidikan Pegawai Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai lebih banyak lulusan Perguruan Tinggi, sehingga dengan latar belakang tersebut diharapkan dapat menjalankan tugas pokoknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk mengetahui jenis kelamin Pegawai Kantor Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.6 : Jumlah Pegawai Kantor Kelurahan Wonorejo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	3	37,5
2	Perempuan	5	62,5
Jumlah		8	100%

Sumber Data : Kantor Kelurahan Wonorejo Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya Pegawai Kantor Kelurahan Wonorejo 8 orang. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 3 orang atau 37,5%,

sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 5 orang atau 62,5%. Jadi pegawai perempuan lebih banyak di bandingkan dengan pegawai laki-laki.

Tabel IV.7 : Jumlah Pegawai Kantor Kelurahan Wonorejo Berdasarkan Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	<30 Tahun	-	-
2.	31-35 Tahun	2	25
3.	36-40 Tahun	3	37,5
4.	41-45 Tahun	2	25
5.	>45 Tahun	1	12,5
Jumlah		8	100%

Sumber Data : Kantor Kelurahan Wonorejo Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa para Pegawai Kantor Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang berumur dibawah 30 tahun tidak ada, yang berumur 31-35 tahun sebanyak 2 orang atau 25% yang berumur antara 36-40 tahun sebanyak 3 orang atau 37,5% yang berumur antara 41-45 tahun sebanyak 2 orang atau 25% dan yang berumur diatas 45 tahun sebanyak 1 orang atau sekitar 12,5%

4.5. Uraian Tugas Aparat Pemerintah Kelurahan Wonorejo

4.5.1. Tugas Pokok Lurah

Memimpin penyelenggaraan pemerintah secara umum, pembinaan pemerintah, ketentraman dan ketertiban, pembinaan, pembangunan fisik dan non fisik kemasyarakatan serta pembinaan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan.

4.5.2 Tugas Pokok Sekretaris Lurah

Merumuskan dan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan.

4.5.3 Tugas Pokok Kasi Pemerintahan

Merumuskan dan melaksanakan serta mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian aparat pemerintahan kelurahan

Fungsinya:

- a. Memberikan motivasi dan melakukan pengawasan terhadap perangkat kelurahan
- b. Memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan tugas aparat RT dan RW
- c. Menertibkan administrasi kependudukan dan lain-lain

4.5.4 Tugas Pokok Kasi Pembangunan

Merumuskan dan melaksanakan serta membina, mendorong dan mengembangkan perekonomian masyarakat, pertanian, perindustrian, dan perdagangan, koperasi unit desa, pengkreditan dan lembaga-lembaga arisan.

Fungsinya:

- a. Menyampaikan usulan proyek kepada walikota
- b. Mensinkronkan kepentingan masyarakat dengan rencana dan kebijakan pemerintah
- c. Menghimpun aspirasi dan keinginan masyarakat yang berkembang
- d. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah yang dilaksanakan kontraktor dan lain-lain

4.5.5 Tugas Pokok Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsinya:

- a. Melakukan penertiban sarana dan prasarana kehidupan masyarakat
- b. Menjalankan pelaksanaan kewenangan yang di berikan oleh walikota pekanbaru berdasarkan keputusan walikota Nomor 112 Tahun 2002 yaitu bidang ketertiban umum,dan lain-lain

4.5.6 Tugas Pokok Kasi Kesejahteraan Sosial

Merumuskan dan melaksanakan serta mempersiapkan rancangan penggerakan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Fungsinya:

- a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui jaringan kerja sama antar umat beragama
- b. Mendorong program kesehatan dengan melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait
- c. Menghimbaukan kepada pengusaha untuk membantu kegiatan program K3., dan lain-lain.

4.5.7. Tugas Pokok Kasi Pelayanan Umum

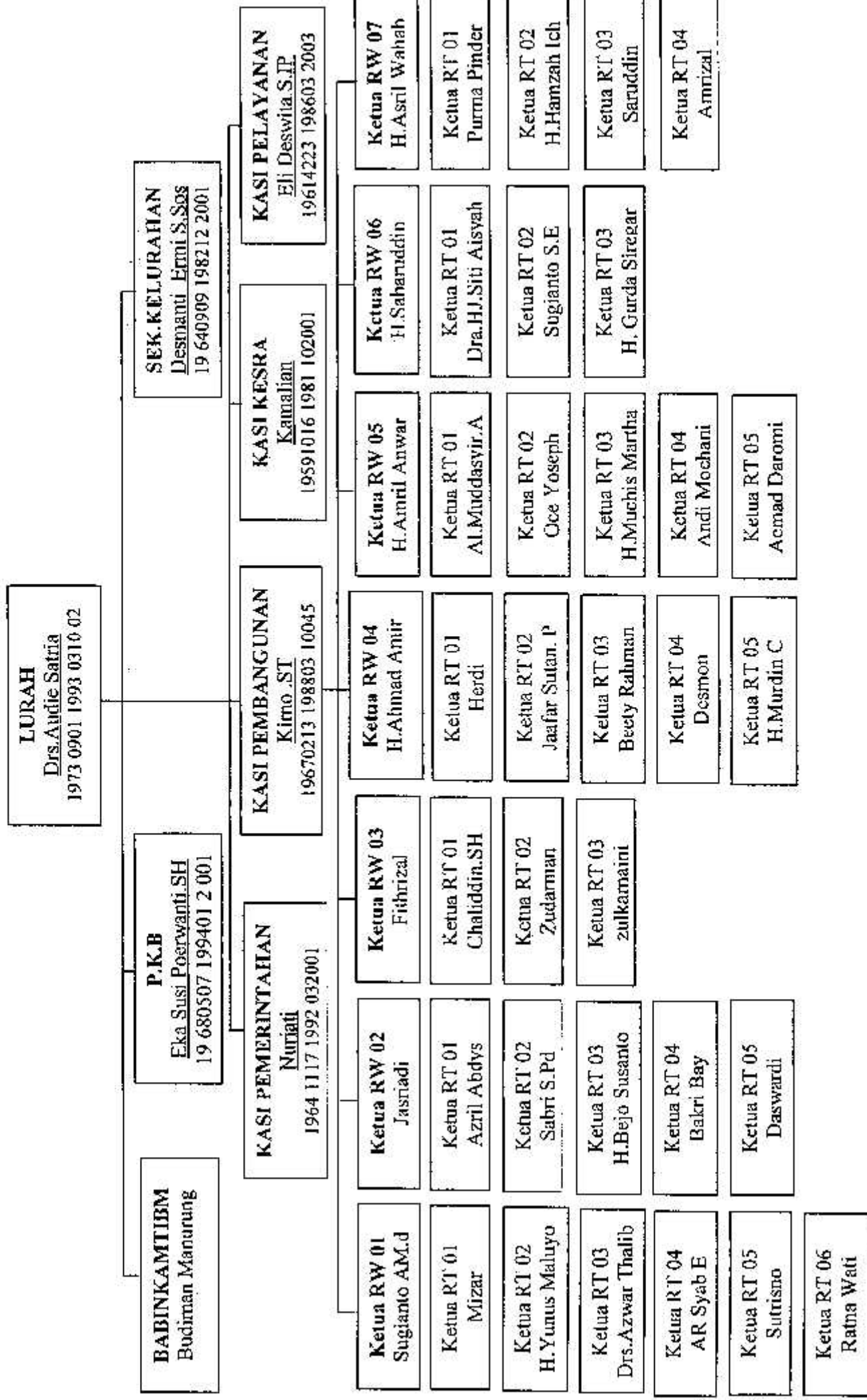
Merumuskan dan melaksanakan serta mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Fungsinya:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Memberikan informasi terhadap pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dengan memasang pamphlet dan membuat loket pelayanan umum, dan lain-lain.

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN WONOREJO

PEMDA NO. 6 TAHUN 2001



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian terhadap 96 responden yang dijadikan sampel yaitu masyarakat Kelurahan Wonorejo yang terdiri dari kepala Keluarga, Ketua RT, Ketua RW. Melalui Angket atau Kuisioner, dan hasil wawancara dengan kepala Kelurahan Wonorejo dan Petugas Retribusi Kebersihan maka diperoleh data-data sebagai hasil dari penelitian ini berupa data tentang identitas responden, data tentang tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Wonorejo dalam membayar retribusi kebersihan dan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan. Mengenai hasil penelitian ini akan diuraikan pada penjelasan berikut ini :

5.1. Identitas Responden

Ada beberapa hal yang akan dibahas sehubungan dengan identitas responden, yaitu responden menurut tingkat umur, responden menurut tingkat pendidikan dan responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan satu persatu sebagai berikut :

5.1.1. Responden Menurut Tingkat Usia

Dari hasil penelitian terhadap 96 responden yaitu masyarakat Kelurahan Wonorejo yang terdiri dari kepala keluarga termasuk Ketua RT dan Ketua RW, diperbolehkan data bahwa umur responden berkisar 25–60 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1. Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	> 30	3	3,1
2	31- 35	9	9,3
3	36 - 40	27	28,1
4	41 - 45	24	25
5	46 - 50	21	21,8
6	51 Keatas	12	12,5
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2011

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang berumur kurang dari 30 tahun berjumlah 3 orang atau 3,1%, umur antara 31-35 tahun sebanyak 9 orang atau 9,3%, tingkat usia 36-40 tahun sebanyak 27 orang atau 28,1%, tingkat usia 41-45 tahun sebanyak 24 atau 25%, tingkat usia 46-50 tahun sebanyak 21 orang atau 21,8%, dan tingkat usia diatas 51 tahun sebanyak 12 orang atau 12,5%.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini umumnya memiliki tingkat rata-rata usia antara 36-40 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang dijadikan sampel penelitian dapat dikategorikan dalam penduduk usia produktif, dalam arti kata masih mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan mengerti tentang keberadaan program retribusi kebersihan. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan tingkat kebenaran atas jawaban yang diberikan melalui angket penelitian yang peneliti sampaikan.

5.1.2. Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa tingkat pendidikan responden yang dijadikan cukup baik, dimana secara umum responden telah mengenyam pendidikan minimal (SD/Sederajat), dalam arti kata responden

minimal telah mampu baca dan tulis. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2. Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar	1	1,0
2	Sekolah Menengah Pertama	20	20,8
3	Sekolah Menengah Atas	39	40,6
4	Diploma 3	15	15,6
5	Strata I	16	16,6
6	Starata 2	5	5,20
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang berpendidikan SD sebanyak 3 responden atau 1,0%, tingkat SMP sebanyak 20 responden atau 20,8%, tingkat SMA sebanyak 39 responden atau 40,6%, tingkat D3 sebanyak 15 responden atau 15,65, tingkat S1 sebanyak 16 responden atau 16,65, dan tingkat S2 sebanyak 5 responden atau 5,20% .

Dalam hal ini menunjukan bahwa responden yang menjadi sampel penelitian ini umumnya pendidikan yang cukup lumayan dalam arti kata telah mendapat pendidikan dasar sehingga diharapkan paling minimal memiliki kemampuan baca tulis. Hal ini tentunya juga sangat berkaitan dengan tingkat kebenaran dan pemahaman atas jawaban yang diberikan melalui angket penelitian yang penelitian sampaikan.

5.1.3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa responden berdasarkan jenis kelamin yang ada hampir sama imbang antara laki-laki dan Perempuan dan untuk lebih jelasnya jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V. 3. Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-Laki	47	49,9
2	Perempuan	49	51,0
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang paling banyak responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin Perempuan sebanyak 49 responden atau 49,9%, sedangkan responden yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 47 responden atau 51,0%.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh dinas terkait soal retribusi kebersihan Kota Pekanbaru, khususnya Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai, dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut:

Tabel V.4 : Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Pekanbaru

No	Kegiatan
1.	Kebersihan <ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan Drainase/Kali/Selokan - Mengangkat sampah dan membuang ke TPS/TPA - Membersihkan badan jalan - Menanam tanaman dan merawatnya
2.	Melakukan sosialisasi Tentang Isi Perda No. 4 Tahun 2000. <ul style="list-style-type: none"> - Memberitahu melalui Media Massa/Elektronik kepada masyarakat - Memberitahu melalui Spanduk, Baliho, dan Selebaran kepada masyarakat - Adanya petugas pemungut retribusi kebersihan kepada masyarakat

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Pekanbaru, 2011

5.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat khususnya di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai

dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru, dengan melakukan analisa data dari hasil jawaban angket/kuisisioner yang diberikan kepada responden. Hasil jawaban angket tersebut akan penulis paparkan dalam bentuk tabel dan persentase berdasarkan indikator variabel serta item-item yang menjadi penilaian, selanjutnya akan di jelaskan secara deskriptif dengan tambahan penjelasan dari hasil wawancara penulis dengan responden dan juga dengan pihak kelurahan dan pihak kecamatan.

5.2.1. Indikator Variabel, Keaktifan Masyarakat Dalam Pembayaran Retribusi Kebersihan

Kebersihan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, untuk itu keterlibatan masing-masing pihak dalam upaya menjaga kebersihan lingkungannya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga tanggung jawab masyarakat kita bersama.

Untuk mengetahui lebih jelas keaktifan masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan di Kelurahan Wonorejo dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.5. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Rutinitas Gotong-Royong Masyarakat.

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	1 s/d 6 kali pertahun	26	27,1
2	7 s/d 12 kali pertahun	42	43,8
3	Lebih dari 12 kali pertahun	28	29,2
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari keterangan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang rutinitas gotong-royong masyarakat Kelurahan Wonorejo, dari 96 sampel

terdapat 26 responden yang menyatakan 1 s/d 6 Kali Pernah atau 27,1%, sebanyak 42 responden yang menyatakan 7 s/d 12 Kali Pernah atau 43,8%, dan 28 responden yang menyatakan lebih dari 12 kali pernahnya atau 29,2%.

Tabel V.6. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Kebersihan Yang Dilakukan Petugas Kebersihan Kota Pekanbaru.

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	30	31,3
2	Kurang baik	46	47,9
3	Tidak baik	20	20,8
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari keterangan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pelaksanaan kebersihan yang dilakukan petugas kebersihan Kota Pekanbaru Kelurahan Wonorejo, dari 96 sampel terdapat 30 responden atau 31,3% yang menyatakan baik, sebanyak 46 responden atau 47,9% yang menyatakan kurang baik, dan sebanyak 20 responden atau 20,8% yang menyatakan tidak baik.

Tabel V.7. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Arah Pembuangan Sampah Rumah Tangga.

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ketempat penampungan yang telah ditetapkan	28	29,1
2	Meletakkannya di tepi jalan	49	51,0
3	Menimbun atau membakarnya	19	19,8
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari keterangan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang arah pembuangan sampah Rumah Tangga selama ini di Kelurahan

Wonorejo, dari 96 sampel terdapat 28 responden atau 29,1% yang menyatakan tempat penampungan yang telah ditetapkan, sebanyak 49 responden atau 51,0% yang menyatakan meletakkannya di tepi jalan, dan sebanyak 19 responden atau 19,8% yang menyatakan menimbun atau membakarnya..

Tabel V.8. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Rutinitas Pembayaran Retribusi Kebersihan Setiap Bulan.

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	37	38,5
2	Kadang-kadang	57	59,4
3	Tidak	2	2,1
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari keterangan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang rutinitas pembayaran retribusi kebersihan setiap bulannya di Kelurahan Wonorejo, dari 96 sampel terdapat 37 responden atau 38,5% yang menyatakan ya sebanyak 57 responden yang menyatakan kadang-kadang atau 59,4% dan 2 responden atau 2,1% yang menyatakan tidak.

Tabel V.9. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pembayaran Retribusi Kebersihan Atas Kesadaran Sendiri Akan Adanya Kewajiban Selaku Warga Kota Pekanbaru

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	33	34,4
2	Kadang-kadang	63	65,6
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari keterangan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pembayaran retribusi kebersihan atas kesadaran sendiri akan adanya kewajiban selaku warga Kota Pekanbaru, dari 96 sampel terdapat 33 responden

atau 34,4% yang menyatakan ya, sebanyak 63 responden atau 65,6% yang menyatakan kadang-kadang.

Tabel V.10. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Cara Melakukan Penyetoran Retribusi Kebersihan.

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Menyetor langsung ke loket pembayaran	17	17.1
2	Dibayar saat mendapat pelayanan di kelurahan atau kecamatan	49	51,0
3	Dipungut ke rumah oleh petugas dari kelurahan atau kecamatan	30	31.3
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari keterangan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang cara penyetoran retribusi kebersihan, dari 96 sampel terdapat 17 responden atau 17.1% yang menyatakan menyetor langsung ke loket pembayaran, sebanyak 49 responden atau 51,0% yang menyatakan dibayar saat mendapat pelayanan di kelurahan atau kecamatan, dan sebanyak 30 responden atau 31.3% yang menyatakan dipungut ke rumah oleh petugas dari kelurahan atau kecamatan.

Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat masih bingung kemana akan membayar kewajiban retribusi kebersihan ini, karena belum adanya loket tempat pembayaran secara resmi. Bagi masyarakat yang membayar langsung, hanya menyetorkan kepada petugas kelurahan yang telah ditunjuk tanpa melalui loket pembayaran. Hal inilah nampaknya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan

Keaktifan masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan, bisa juga dinilai dari tidak terlambatnya masyarakat dalam penyetoran retribusi kebersihan setiap bulannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.11. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Keterlambatan Membayar Retribusi Kebersihan

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pernah	35	36,4
2	Kadang-kadang	37	38,5
3	Tidak Pernah	24	25
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui sebanyak 35 responden atau 36,4%, menyatakan bahwa Pernah terlambat membayar retribusi kebersihan. Sedangkan 37 responden atau 38,5%, menyatakan kadang-kadang terlambat membayar retribusi kebersihan. dan sedangkan yang menyatakan tidak pernah 24 responden atau 25%.

Dari data diatas dapat pula penulis gambarkan bahwa secara umum masyarakat selalu terlambat dalam pembayaran retribusi kebersihan setiap bulannya. Dari hasil wawancara diketahui, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak jelasnya loket tempat pembayaran, tidak rutinnya petugas melakukan pemungutan pada setiap awal bulan dan juga masih banyaknya masyarakat yang hanya membayar jika petugas memungut atau jika diminta membayar ketika melakukan pelayanan di kelurahan atau di kecamatan.

Dari beberapa paparan di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat keaktifan petugas dalam melakukan pemungutan retribusi. Dalam kenyataannya tingkat penerimaan retribusi kebersihan masih sangat rendah, hal ini ternyata juga disebabkan masih terdapatnya masyarakat yang menolak ketika dipungut oleh

petugas dengan berbagai macam alasan. Untuk melihat seberapa besar masyarakat yang pernah melakukan penolakan dalam membayar retribusi kebersihan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.12. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Penolakan Masyarakat Ketika Dipungut Oleh Petugas Retihusi Kebersihan

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pernah	31	32,2
2	Kadang-kadang	39	40,6
3	Tidak pernah	26	27,1
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 31 responden atau 32,2% menyatakan bahwa mereka pernah menolak membayar retribusi kebersihan ketika dipungut petugas, dan sebanyak 39 responden atau 40,6% yang menjawab kadang-kadang menolak membayar retribusi kebersihan ketika dipungut petugas dan sedangkan yang menyatakan tidak pernah sebanyak 26 responden atau 27,1%.

Tabel V.13. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Alasan Tidak Menyctor Karena Takut Setoran Tidak Sampai Ke Kas Daerah

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	31	32,3
2	Tidak ada	32	33,3
3	Ragu-ragu	33	6,2
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden alasan tidak menyctor karena takut setoran tidak sampai ke kas daerah, sebanyak 96 sampel, 31 responden atau 32,3% yang menyatakan "Ada" sebanyak 32 responden atau

33,3% yang menyatakan tidak ada dan sebanyak 33 responden atau 6,2% yang menyatakan ragu-ragu.

Dari alasan mereka berikan mengapa pernah menolak membayar retribusi kebersihan ketika dipungut petugas?, mereka menjawab karena tidak terjadwalnya masa pemungutan retribusi, sehingga ketika dipungut lagi tidak ada uang, ada juga yang memberi alasan karena sudah dipungut oleh petugas kebersihan lingkungan mereka, yang secara swadaya sendiri melakukan pengumpulan sampah masyarakat, selain itu juga ada yang beralasan karena sampah mereka jarang dipungut oleh petugas kebersihan dan ada juga yang beralasan takut uang mereka tidak sampai ke kas daerah.

5.2.2. Indikator Variabel, Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pemungutan Retribusi Kebersihan Oleh Pemerintah.

Secara swadaya masyarakat di lingkungannya karena sebagian masyarakat melakukan pengumpulan sampah masyarakat, beralasan karena sampah mereka jarang dipungut oleh petugas kebersihan, dan juga yang beralasan takut uang mereka tidak sampai ke kas daerah.

Dalam pengamatan penulis beberapa alasan masyarakat ini, bisa dapat diterima, namun hal ini terjadi sebenarnya karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi retribusi kebersihan kota pekanbaru secara umum dan masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang isi Perda No.04 tahun 2000 itu. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kelurahan itu sendiri kepada masyarakat, masih rendah aktivitas pemungutan retribusi oleh petugas

yang di sebabkan karena terbatasnya personil yang ada di lingkungan kelurahan tersebut.

Pada pembahasan sub bab sebelumnya tergambar bahwa masih rendahnya tingkat keaktifan masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan. Selanjutnya akan penulis bahas pada indikator variabel tentang tingkat pelaksanaan sosialisasi Perda Kota Pekanbaru no. 4 tahun 2000 tentang retribusi kebersihan dan pelaksanaan pemungutan oleh petugas pemerintahan. Untuk mengetahui sejauhmana mengertinya atau tahunya masyarakat tentang isi Perda Kota Pekanbaru no. 4 tahun 2000 dapat dilihat pada tabel beriku ini :

Tabel V.14. : Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Apakah Responden Tahu/Mengerti Isi Dari Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2000

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tahu	43	44,8
2	Tidak tahu	37	38,5
3	Ragu-ragu	16	16,7
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa apakah rsponden tahu/mengerti isi dari Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2000, sebanyak 43 responden atau 44,8% yang menyatakan Tahu sebanyak 37 responden atau 38,5% yang menyatakan tidak tahu dan sebanyak 16 responden atau 16,7% yang menyatakan ragu-ragu.

Tabel V.15. : Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Adanya Kewajiban Pembayaran Retribusi Sampah Pemko Pekanbaru Melalui Kelurahan atau Kecamatan.

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tahu	27	28.1
2	Tidak tahu	46	47.9
3	Ragu-ragu	23	24.0
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden tentang pengetahuan adanya kewajiban pembayaran retribusi sampah Pemerintah Kota Pekanbaru melalui kelurahan atau kecamatan, sebanyak 27 responden atau 28,1% yang menyatakan Tahu sebanyak 46 responden atau 47,9% yang menyatakan tidak tahu sedangkan yang ragu-ragu sebanyak 23 responden atau 24,0% .

Tabel V.16. : Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2000

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pernah	32	33.3
2	Tidak pernah	46	47.9
3	Ragu-ragu	18	18,8
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang belum pernah mendapat sosialisasi Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2000, sebanyak 96 sampel, 32 responden atau 33,3% yang menyatakan “Pernah” sebanyak 46 responden atau 47,9% yang menyatakan tidak pernah dan sebanyak 18 responden atau 18,8% yang menyatakan ragu-ragu.

Sebelum membahas tentang retribusi kebersihan penulis sedikit akan memaparkan tentang kepedulian masyarakat dalam melaksanakan kebersihan di lingkungannya. Secara umum masyarakat Kelurahan Wonorejo telah melaksanakan gotong royong untuk kebersihan lingkungannya secara rutin. Walaupun waktu pelaksanaan gotong royong (goro) tersebut cukup beragam, dimana ada sebagian RT yang hampir setiap bulannya melakukan gotong royong kebersihan bahkan ada pula yang melakukan gotong royong saat menghadapi musim hujan atau saat menyambut hari kemerdekaan saja.

Rutinitas gotong royong kebersihan oleh masyarakat secara umum telah menurunkan pelaksanaannya, terutama karena sebagian besar jalan dan parit di lingkungan masyarakat yang ada di Kelurahan Wonorejo telah dibersihkan oleh petugas kebersihan, sehingga masyarakat jadi malas untuk bergotong royong.

Pemerintah secara umum telah berbuat dalam melaksanakan program kebersihan, walaupun banyak pihak menyatakan masih belum optimal, padahal untuk pelaksanaan program kebersihan ini pemerintahan telah menghabiskan anggaran yang cukup besar dari APBD kota pekanbaru.

Lingkungan rumah tinggal merupakan salah satu objek retribusi sampah yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, ternyata hasil retribusi sampah pada saat ini belum dapat diandalkan sebagai sumber keuangan daerah. Rendahnya penerimaan pemerintahan dari retribusi kebersihan terlihat dari tidak tercapai target penerimaan retribusi dan ini disebabkan karena rendahnya kepedulian masyarakat dalam kewajibannya untuk membayar retribusi kebersihan tersebut, namun memang akhir-akhir ini sudah

sangat jarang dilakukan kecuali melalui himbauan media masa seperti koran dan televisi.

Dalam melakukan sosialisasi Perda no.4 tahun 2000 tentang retribusi kebersihan ini. Tidaklah semata-mata harus dilakukan secara formal seperti melalui pertemuan atau rapat resmi di kelurahan atau kecamatan, tetapi bisa juga memanfaatkan media-media lainnya yang lebih akrab dan dekat dengan masyarakat. Untuk mengetahui melalui media apakah masyarakat tahu tentang kewajiban retribusi kebersihan ini dapat kita lihat dari tabel berikut :

Tabel V.17. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Media Sosialisasi Yang Diterima Tentang Kewajiban Retribusi Kebersihan.

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Himbauan melalui koran/televisi	34	35,4
2	Himbauan melalui spanduk atau baliho	44	45,8
3	Himbauan melalui selebaran	18	18,8
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa media sosialisasi yang diterima masyarakat sehingga tahu tentang kewajiban retribusi ini adalah melalui himbauan koran/televisi yakni 34 responden atau 35,4%, sebanyak 44 responden atau 45,8% yang menyatakan himbauan melalui spanduk dan baliho, sedangkan 18 responden atau 18,8% yang menyatakan himbauan melalui selebaran.

Selain melakukan sosialisasi, untuk meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi kebersihan, semestinyalah pemerintah menyediakan sarana dan prasarana agar pembayaran retribusi kebersihan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu sarana yang cukup penting menurut penulis adalah perlu

disediakannya loket khusus tempat pembayaran retribusi kebersihan, agar dengan mudah masyarakat dapat melakukan penyetoran. Untuk mengetahui apakah pemerintah telah menyediakan loket pembayaran retribusi kebersihan ini layaknya loket pembayaran listrik (PLN) atau loket air bersih, dapat kita lihat dari tanggapan responden pada tabel berikut :

Tabel V.18. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Loket Tempat Pembayaran Retribusi Kebersihan Yang Disediakan Pemerintah

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	27	28,1
2	Tidak ada	45	46,9
3	Ragu-ragu	24	25,0
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 27 responden atau 28,1%, menyatakan bahwa adanya loket pembayaran retribusi kebersihan yang disediakan pihak kelurahan dan pihak kecamatan, tetapi sebagian besar menyatakan tidak ada yakni sebanyak 45 responden atau 46,9%, sedangkan yang masih ragu-ragu apakah ada sebanyak 24 responden atau 25,0%.

Setelah penulis konfirmasi melalui wawancara, ternyata loket pembayaran retribusi kebersihan belumlah ada layaknya loket pembayaran listrik (PLN) atau loket air bersih, namun pemerintah hanya menyiapkan petugas untuk memungutnya ataupun menunjuk petugas yang menerima setoran retribusi kebersihan ini di setiap kantor kelurahan dan kantor kecamatan, yang selanjutnya uang setoran tersebut dihimpun oleh petugas kecamatan untuk diserahkan kepada kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam pemungutan retribusi kebersihan seperti data-data sebelumnya nampak belum diupayakan semaksimal mungkin, padahal ini merupakan tugas pemerintah agar penerimaan retribusi kebersihan dapat terus ditingkatkan. Untuk melihat sejauhmana pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan oleh petugas secara langsung kepada masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.19. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Adakah Petugas Yang Datang Langsung Kerumah Untuk Memungut Retribusi Kebersihan

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	37	38,5
2	Tidak ada	50	52,1
3	Ragu-ragu	9	9,4
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan oleh petugas secara langsung kepada masyarakat masih rendah yakni yang menyatakan ada pemungutan langsung yaitu sebanyak 37 responden atau 38,5%, sedangkan yang menyatakan tidak, pernah dipungut kerumah secara langsung sebanyak 50 responden atau 52,1%, bahkan terdapat yang ragu-ragu apakah ada pungut atau tidak sebanyak 9 responden atau 9,4 %.

Dari hasil wawancara dengan pihak kelurahan dan pihak kecamatan, memang diakui bahwa belum semua lingkungan rumah tangga pada setiap RT yang mampu terjangkau oleh pemungut retribusi kebersihan, baru sebagian kecil karena keterbatasan personil yang ada, yakni hanya dua orang petugas untuk setiap kelurahannya. Dalam pengamatan penulis tentunya hal ini tidak akan sebanding dengan jumlah penduduk atau kepala keluarga yang mesti ditagih.

Namun walaupun begitu, telah ada upaya-upaya pihak kelurahan untuk melibatkan ketua RT dan ketua RW dalam hasil pemungutan retribusi kebersihan ini, tetapi kenyataannya belum setiap ketua RT dan ketua RW yang dilibatkan karena alasan tidak seimbangnya antar pendapatan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk petugas tersebut.

Selain adanya sarana dan petugas, menurut penulis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam membayar retribusi kebersihan adalah melalui pemberian sanksi atau hukuman, sehingga akan memberikan *shock terapi* bagi masyarakat lainnya yang masih enggan dalam membayar retribusi kebersihan.

Tabel V.20. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Unsur Petugas Melakukan Pemungutan Retribusi Kebersihan

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Unsur dari RT dan RW setempat	36	37,5
2	Unsur dari Kelurahan	47	49,0
3	Unsur dari Kecamatan	13	13,5
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 36 responden atau 37,5%, menyatakan bahwa unsur dari RT dan RW setempat. tetapi sebagian besar menyatakan unsur dari kelurahan yakni sebanyak 47 responden atau 49,0%, sedangkan sebanyak 13 responden atau 13,5% menyatakan unsur dari kecamatan.

Untuk mengetahui tentang adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar retribusi kebersihan dapat kita lihat dari tanggapan responden pada tabel berikut ini :

Tabel V.21. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Adakah Sangsi/Hukuman Bagi Masyarakat Yang Tidak Membayar Retribusi Kebersihan

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	34	35,4
2	Tidak ada	47	49,0
3	Ragu-ragu	15	15,6
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 34 responden atau 35,4 % menyatakan adanya sangsi atau hukuman bagi masyarakat yang tidak membayar retribusi kebersihan, sedangkan yang menyatakan tidak ada sangsi atau hukuman sebanyak 47 responden atau 49,0 % dan terdapat yang ragu-ragu apakah adanya sangsi atau tidak sebanyak 15 responden atau 15,6 %.

Menurut responden yang menyatakan adanya sangsi, karena sampah mereka pernah tidak dipungut oleh petugas kebersihan dikarenakan banyaknya warga yang tidak membayar retribusi kebersihan kepada petugas pemungut retribusi kebersihan. Sedangkan yang menjawab tidak adanya sangsi atau hukuman karena mereka belum pernah mendapat sangsi tersebut.

Dari wawancara dengan pihak kelurahan dan pihak kecamatan sangsi yang diberikan selama ini bagi masyarakat yang tidak membayar retribusi kebersihan masih sebatas sangsi moral, seperti tidak dipungutnya sampah mereka untuk beberapa waktu ataupun melalui hukuman berupa tidak dilayaninya pengurusan surat menyurat baik di kelurahan maupun di kecamatan sampai mereka mau membayar retribusi kebersihan tersebut. Untuk mengetahui tentang adanya sangsi

yang diberikan berupa tidak dilayani ketika berurusan dengan pihak kelurahan dapat kita lihat dari tanggapan responden pada tabel berikut ini :

Tabel V.22. Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Sangsi Yang Diberikan Berupa Tidak Dilayani Ketika Berurusan Dengan Pihak Kelurahan

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	38	39,6
2	Tidak ada	45	46,9
3	Ragu-ragu	13	13,5
Jumlah		96	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 96 sampel sebanyak 38 responden atau 39,6 % menyatakan adanya sangsi yang diberikan berupa tidak dilayani ketika berurusan dengan pihak kelurahan, sedangkan yang menyatakan tidak ada sangsi sebanyak 45 responden atau 46,9 % dan terdapat yang ragu-ragu apakah adanya sangsi atau tidak sebanyak 13 responden atau 13,5 %.

Dari pembahasan dua indikator variabel di atas maka dapat diambil hasil penelitian dengan mengacu kepada item-item penilaian sebagai berikut

Tabel V.23 : Hasil Penelitian Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru
Keaktifan Masyarakat dalam Pembayaran Retribusi Kebersihan

Item Penilaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Kategori / Rasio
Membayar atas kesadaran sendiri	33	33	Rendah
Datang sendiri ke loket Pembayaran	17	17	Rendah
Tidak pernah menolak petugas pemungut retribusi kebersihan	26	26	Rendah
Tidak Pernah terlambat dalam pembayaran	24	24	Rendah
Jumlah Rata-Rata	25,0	25,0%	Rendah

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Interval penilaian:

01 - 33 – Rendah

34 - 36 = Sedang

67 - 99 = Tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator keaktifan masyarakat dalam membayar Retribusi kebersihan pada item penilaian membayar atas kesadaran sendiri berjumlah 33 responden atau 33% sedangkan pada item penilaian datang sendiri ke loket pembayaran berjumlah 17 responden atau 17% juga, dan item penilaian Tidak pernah menolak petugas pemungut retribusi kebersihan berjumlah 26 responden atau 26% selanjutnya item penilaian pada tidak pernah terlambat dalam pembayaran berjumlah 24 responden atau 24%

Sehingga dari data di atas diambil kesimpulan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya di

Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai adalah rendah atau kurang baik.

Selanjutnya untuk mengetahui peran pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Dari variabel tingkat sosialisasi dan pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan.ditampilkan pula dalam tabel berikut:

Tabel V.24 : Hasil Penelitian Tentang Tingkat Pelaksanaan Sosialisasi Perda No.4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kebersihan

Pelaksanaan sosialisasi perda No4 tahun 2000 tentang retribusi kebersihan oleh pemerintah			
Item	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Kategori / Rasio
Adanya sosialisasi yang optimal berupa :			
Himbauan melalui media massa (cetak /elektronik)	34	34	Sedang
Himbauan melalui spanduk, baliho.	44	44	Sedang
Himbauan melalui selebaran	18	18	Rendah
Jumlah Rata-rata	32,0	32,0%	Rendah

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pelaksanaan sosialisasi perda no. 4 tahun 2000 tentang retribusi kebersihan oleh pemerintah khususnya oleh Pemerintah Kelurahan Wonorejo dan Kecamatan Marpoyan Damai adalah masih rendah atau kurang baik.

Tabel V.25 : Hasil Penelitian Tentang Tingkat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Oleh Pemerintah			
Item Penilaian	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Kategori / Rasio
Adanya loket tempat pembayaran retribusi	7	7	Rendah
Adanya petugas pemungutan retribusi di setiap RW atau RT	36	36	Sedang
Adanya sangsi (hukuman)	34	34	Sedang
Jumlah rata-rata	25,70	25,70%	Rendah

Sumber: Data olahan penelitian tahun 2011

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan oleh pemerintah khususnya oleh Pemerintah Kelurahan Wonorejo Dan Kecamatan Marpoyan Damai adalah masih Rendah atau kurang baik.

Dalam hal ini nampak bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran retribusi kebersihan di pengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pelaksanaan sosialisasi perda no.4 tahun 2000 dan juga masih rendah upaya-upaya pemungutan retribusi kebersihan tersebut oleh pemerintah sendiri.

Sebagai gambaran tentang Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari tahun 2006-2010 dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel V.26. : Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Dari Tahun 2007 Sampai 2010

No	Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan/ Penurunan	Persentase (%)
1	2006	102.000.000.000	104.450.974.414	2.450.974.414	102,4
2	2007	150.050.000.000	109.039.133.688	-41.010.866.312	72,6
3	2008	157.545.485.159	118.745.167.703	-38.800.317.456	75,3
4	2009	176.871.910.320	129.859.965.945	-47.011.944.375	73,4
5	2010	185.962.920.410	138.765.920.986	-47.196.999.424	74,6

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pendapatan asli daerah kota Pekanbaru dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dan penurunan yaitu pada tahun 2006 target PAD Kota Pekanbaru sebesar Rp. 102.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 104.450.974.414 atau meningkat Rp. 2.450.974.414 atau 102,4% target yang tercapai. Tahun 2007 target PAD Kota Pekanbaru sebesar Rp. 150.050.000.000 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 109.039.133.688 ini berarti menurun dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. -41.010.866.312 atau 72,6% target yang dicapai. Tahun 2008 target PAD Kota Pekanbaru sebesar Rp. 157.545.485.159 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 118.745.167.703 ini berarti menurun dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. -38.800.317.456 atau 75,3% target yang tercapai. Tahun 2009 target PAD Kota Pekanbaru sebesar Rp. 176.871.910.320 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 129.859.965.945 ini berarti menurun dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. -47.011.944.375 atau 73,4% target yang tercapai. Tahun 2010 target PAD Kota Pekanbaru sebesar Rp. 185.962.920.410 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 138.765.920.986 ini berarti menurun dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. -47.196.999.424 atau 74,6% target yang tercapai.

5.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Retribusi Kebersihan

Dari hasil penelitian baik itu yang bersumber dari angket maupun dari wawancara maka dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru, yaitu antara lain (Pangabean, 2000 : 34).

a. Tingkat pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri, apa bila masyarakat itu memiliki pendidikan yang tinggi mereka akan tahu tentang pentingnya pembayaran retribusi itu sendiri. Tetapi kalau masih banyak masyarakat yang mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak tahu akan pentingnya pembayaran retribusi kebersihan untuk pembangunan kedepannya. Maka itu masyarakat kurang berpartisipasi dalam membayar retribusi kebersihan.

b. Pendapatan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan

masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. Pendapatan masyarakat juga dapat berpengaruh dalam berpartisipasi masyarakat itu sendiri, karena masyarakat kebanyakan hidupnya serba kurang, ini disebabkan kurangnya pendapatan yang diperoleh masyarakat itu sendiri sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan retribusi kebersihan itu sendiri.

d. Penyuluhan

Hal ini juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi itu sendiri, karena pemerintah telah membuat program tentang retribusi kebersihan itu sendiri. tetapi dari pihak pemerintahan itu sendiri kurang optimal dalam melakukan sosialisasi perda No.04 Tahun 2000 tentang retribusi kebersihan, yang ada sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu tentang perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga partisipasi masyarakat berkurang terhadap program pemerintah itu sendiri.

e. Sikap

Sikap masyarakat terhadap dalam program pemerintah itu sendiri kurang dipahami karena banyak masyarakat yang tidak mau tahu akan pentingnya membayar retribusi kebersihan itu sendiri. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar retribusi itu sendiri

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas maka penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat rata-rata keaktifan masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan dengan indikasinya yaitu pembayaran retribusi bukan atas kesadaran sendiri, pembayaran menunggu jika diminta, masih banyak yang menolak jika dilakukan pemungutan retribusi kebersihan, dan masih banyak masyarakat yang membayar retribusi tidak tepat pada waktunya
2. Tingkat pelaksanaan sosialisasi perda No. 14 tahun 2004 tentang Retribusi Kebersihan yang dilakukan pihak kelurahan Wonorejo masih belum optimal, hal ini dibuktikan dengan tingkat pelaksanaan sosialisasi melalui sarana komunikasi yang ada seperti melalui himbauan melalui media massa (cetak dan elektronik), maupun himbauan melalui spanduk dan selebaran masih sangat rendah.

3. Selanjutnya tingkat pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan terhadap masyarakat oleh petugas juga masih rendah. dimana indikasinya menunjukkan belum tersedianya loket khusus tempat pembayaran retribusi kebersihan. sehingga pembayaran hanya dilakukan di kantor pada pegawai yang ada, masih sedikitnya jumlah petugas pemungut retribusi kebersihan, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh RT dan RW sekelurahan Wonorejo, dan belum adanya sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang menolak dalam pembayaran retribusi kebersihan tersebut.
4. Adapun faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dalam membayar Retribusi Kebersihan kota Pekanbaru adalah pendidikan, pendapatan, penyuluhan kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi perda No. 14 tahun 2004 tentang Retribusi Kebersihan dan juga sikap dari masyarakat itu sendiri.

6.2. Saran

Dari keterangan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Program kebersihan kota Pekanbaru oleh Walikota Pekanbaru perlu didukung semua pihak agar kenyamanan hidup masyarakat kota dapat ditingkatkan dan penghargaan Piala

Adipura terus dapat dipertahankan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program pemerintah kota dibidang kebersihan.

2. Pelaksanaan program kebersihan selama ini cukup besar menggunakan dana APBD Kota Pekanbaru, untuk itu diperlukan upaya-upaya oleh pemerintah kota bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan agar sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari Retribusi Kebersihan dapat ditingkatkan.
3. Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Kebersihan, maka diperlukan optimalisasi upaya-upaya sosialisasi tentang Perda No. 14 Tahun 2004, sekaligus menyiapkan sarana dan prasarannya seperti menambah jumlah personil pemungutan Retribusi Kebersihan dan menyiapkan loket pembayaran Retribusi Kebersihan secara khusus di setiap kantor Kelurahan se Kota Pekanbaru.
4. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Retribusi Kebersihan ini, maka perlu upaya yang lebih optimal oleh pemerintah kota dan pemerintah kecamatan serta pemerintah kelurahan dalam penyampaian dan himbauan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana komunikasi

dan informasi yang ada, seperti media massa baik elektronik maupun cetak dan;

5. Jika memungkinkan sebaiknya kepada masyarakat yang tidak membayar Retribusi Kebersihan diberi sanksi yang setimpal, sehingga akan dapat memberi pelajaran kepada masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aca, Sughandhy dan Hakim, Rustam. 2007, *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Adam, Normcis dkk, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia*. Karya Ilmu, Surabaya
- Bratakusumah, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT. Gramedia. Jakarta
- Budiarjo, Miriam, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Devas, Nick. 2000. *Kuangan Pemerintah Indonesia*. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchana, 2002, *Hubungan Masyarakat. Suatu Studi Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Elly, Setiadi. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Fitriana, 2010, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun*
- IKAPI, 2002. *Aspek Sosial Lingkungan (AMDAL)*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ismail, Tjip, 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia (edisi Kedua)*. Yelow Printing, Jakarta
- Kencana Syaf'i, Inu, 2002, *Ilmu Pemerintahan*, Mandan Maju, Bandung
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pres, Jakarta
- Labolo, M. Hadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan, suatu kajian, teori, Konsep dan Pengembangan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mardiasmo, 2004, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2006, *Kybernologi (Sebuah Scientific Enterprise)* Sirgo Credentia Center, Jakarta.